



INISIATIF KEAMANAN PERDAGANGAN DALAM KEBIJAKAN EKONOMI LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT

Toton Hartanto

Universitas Indonesia, Indonesia. Email: toton.hartanto@customs.go.id

INFO ARTIKEL

SEJARAH ARTIKEL

Diterima Pertama
26 Juli 2013

Revisi
6 Desember 2013

Dinyatakan Dapat Dimuat
9 Desember 2013

KATA KUNCI:

*economic statecraft,
container security initiative,
security threat,
economic threat,
global war on terrorism.*

ABSTRAK

The research objective was to test the impact of security threat and economic threat against U.S. to the choice of Container Security Initiative (CSI) as the instrument of foreign policy of US in Global War on Terrorism (GWOt). The analysis employed by this research was Economic Statecraft Concept (Baldwin, 1985) as the main theory. The literature review of the research was able to find the existence of security threat and economic threat pushing US to put their choice on CSI as the economic statecraft in the policy of GWOt. The research employed qualitative model in which the statistical data analysis used was logistic regression and it was obtained proves that justified CSI as the economic statecraft, the different response coming out between countries against the target of CSI was influenced by the interest of their economics and the consideration of the benefit value of the trading relationship within long term period.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *security threat* dan *economic threat against U.S.* terhadap pilihan *Container Security Initiative (CSI)* sebagai instrumen kebijakan luar negeri AS dalam *Global War on Terrorism (GWOt)*. Analisis dalam penelitian ini menggunakan *Economic Statecraft Concept (Baldwin, 1985)* sebagai teori utama. Kajian literatur dalam penelitian ini menemukan adanya *security threat* dan *economic threat* yang mendorong AS memilih CSI sebagai *economic statecraft* dalam kebijakan GWOt. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dimana dari pengolahan data statistik menggunakan *logistic regression* didapatkan adanya bukti yang membenarkan CSI sebagai *economic statecraft*, perbedaan respon negara target terhadap CSI dipengaruhi kepentingan ekonominya dan pertimbangan manfaat hubungan perdagangan dalam jangka panjang.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Serangan terorisme ke Amerika Serikat (AS) pada tanggal 11 September 2001 telah menjadi simbol perkembangan baru gerakan terorisme, yang membawa implikasi terhadap perspektif keamanan internasional. PBB pada tanggal 28 September 2001, mengeluarkan Resolusi DK PBB Nomor 1373 tahun 2001 yang secara ringkas memuat keharusan (*mandatory obligation*) setiap negara untuk melakukan tindakan yang serius dalam memerangi terorisme internasional. Terlepas dari terorisme telah menjadi ancaman bersama namun bobot isi resolusi tersebut dapat diartikan sebagai wadah bagi kepentingan nasional AS.

Penggunaan pesawat terbang komersial sebagai alat serangan 11 September terhadap gedung WTC, telah mempengaruhi AS untuk meningkatkan kewaspadaannya. Berdasarkan pemikiran para pengambil keputusan keamanan nasional, organisasi teroris semakin bersemangat untuk menghancurkan infrastruktur ekonomi negara sebagai upaya mencapai target politik mereka. Dengan mempertimbangkan hal ini, AS membuat serangkaian kebijakan yang menjamin keamanan nasionalnya

terlindungi, termasuk pengamanan obyek vital ekonomi dan politiknya.

Singh (2006) menjelaskan bahwa serangan terorisme 11 September 2001 merupakan pemicu kemunculan kebijakan luar negeri AS yang dikenal sebagai *The Bush Doctrine*. Doktrin tersebut memuat tentang *pre-emptive*, kontrol terhadap *weapon of mass destruction* dan perang terhadap terorisme, perubahan rejim untuk *rogue states*, dan demokrasi (Singh, 2006: 11).

Salah satu kebijakan luar negeri AS terkait dengan *The Bush Doctrine* adalah serangan militer ke rejim Taliban di Afghanistan. Sebagai pelaksanaan *pre-emptive war* terhadap jejaring terorisme, dan pergantian rejim. Ini menunjukkan bahwa Bush dalam *Global War on Terrorism* menekankan pada tingkat kekuatan militer, kepemimpinan, fokus pada *rogue states*, dan kebutuhan untuk bertindak *pre-emptive* (Swanson, 2003:120).

Selanjutnya menjadi objek penelitian yang menarik, ketika AS mengeluarkan kebijakan *Container Security Initiative (CSI)*, yang diluncurkan pada Januari 2002. CSI merupakan kebijakan ekonomi luar negeri AS untuk tujuan keamanan nasional AS.

Sehingga obyek kebijakan ini adalah seluruh peti kemas yang masuk ke AS. Saat ini sekitar 90 persen perdagangan dunia dikapalkan dalam peti kemas (*container*). Setengahnya peti kemas tersebut dibongkar di berbagai pelabuhan di AS setiap tahunnya (US CBP, 2011, para. 4). Dan kebijakan CSI bertujuan untuk memastikan bahwa semua barang yang masuk ke AS adalah aman.

Menjadi penting untuk kemudian melakukan suatu penelitian mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong AS menggunakan CSI sebagai *economic statecraft* dalam kebijakan GWOt-nya. Selanjutnya penulis juga akan memaparkan tentang mengapa China, yang sering berseberangan baik dalam kebijakan ekonomi maupun politik internasional AS, menandatangani CSI dan memperbolehkan *Customs and Border Protection* AS berkantor di negaranya padahal tuntutan berlaku *reciprocal* tidak disetujui AS, AS hanya memperbolehkan Jepang dan Kanada.

1.2. Rumusan Permasalahan

Dari paparan latar belakang permasalahan di atas, terdapat yang menarik untuk dijadikan sebagai rumusan permasalahan, yaitu: Kebijakan *Global War on Terrorism* AS yang merupakan kepanjangan *Bush Doctrine* memiliki pendekatan yang lebih merupakan strategi kontra terorisme dengan penggunaan kekuatan militer yang lebih dominan, sehingga keluarnya *Container Security Initiative* (CSI) menjadi objek penelitian menarik karena CSI merupakan kebijakan ekonomi luar negeri AS namun digunakan untuk kepentingan pencapaian politik AS di tingkat internasional.

Dari pemikiran tersebut, maka penelitian ini akan menelaah dan menggambarkan pertanyaan penelitian sebagai berikut: *Mengapa Amerika Serikat memilih strategi economic statecraft sebagai salah satu instrumen kebijakan GWOt-nya dengan membuat Container Security Initiative (CSI)?* Penelitian tersebut hanya dibatasi pada periode 2001 sebagai tahun dasar pengambilan kebijakan untuk mendapat kerangka analisa yang memadai.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh penjelasan tentang latar belakang dipilihnya strategi *economic statecraft* dengan mengeluarkan CSI sebagai salah satu instrumen kebijakan luar negeri AS dalam GWOt. Selain itu juga untuk mendapatkan penjelasan tentang efektifitas CSI dengan mendapatkan faktor penjabar tentang perbedaan respon negara target terhadap kebijakan AS ini. Terakhir penelitian ini juga ingin mendapatkan manfaat dan biaya dari menerima atau menolak menandatangani CSI.

1.4. Hipotesis

Security threat maupun *economic threat* diduga mempengaruhi para pengambil keputusan kebijakan luar negeri AS. Dimana kedua jenis ancaman tersebut diyakini oleh para pengambil keputusan di AS sebagai

ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup AS. Semakin tinggi *threat against U.S.*, baik itu isu keamanan maupun ekonomi, akan membuat AS menggunakan berbagai instrumen yang dimilikinya untuk menghapus ancaman tersebut. Berdasarkan paparan tersebut, penulis akan membuktikan hipotesis penelitian sebagai berikut: "*Security threat* dan *economic threat* mempengaruhi secara signifikan terhadap CSI sebagai Instrumen *Economic Statecraft* dalam Kebijakan GWOt AS".

2. KERANGKA TEORITIS

Container Security Initiative (CSI) merupakan instrumen kebijakan GWOt yang keluar sesudah *Customs Trade Partnership Against Terrorism* (C-TPAT) atau dikenal dengan *Authorized Economic Operator* (AEO), dan di Indonesia diadopsi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2010 tanggal 9 Desember 2010 yang mengacu pada *Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade* (SAFE FoS) *World Customs Organization* (WCO).

Berdasarkan data yang dikeluarkan *US CBP Representative* yang dimutakhirkan sampai dengan Mei 2011, berikut negara yang pelabuhannya (*port*) telah mengimplementasikan CSI (DHS, 2011) yaitu Kanada, Belanda dan Prancis (Tahun 2002); Jerman, Belgia, Singapura, Jepang, Hongkong, Inggris, Italia, Korea Selatan, Swedia, dan Afrika Selatan (Tahun 2003); Spanyol, Thailand, Malaysia, dan Yunani (Tahun 2004); China, Taiwan, Uni Emirat Arab, Brazil, Sri Lanka, Argentina, dan Portugis (Tahun 2005); Oman, Honduras, Republik Dominika, Jamaica dan Bahamas (Tahun 2006); Pakistan, Panama, Kolumbia, Israel, dan Mesir (Tahun 2007).

2.1. *Container Security Initiative* (CSI) dalam Perdagangan Internasional

Berdasarkan penelitian Mirza dan Verdier (2011:1) menunjukkan adanya suatu hubungan interdependensi antara perdagangan, keamanan dan terorisme global. Dalam penelitian tersebut Mirza dan Daniel juga menyebutkan bahwa berdasarkan analisa statistik dengan pendekatan *gravity model* mendapatkan suatu pola yang menguatkan temuan Laporan Uni Eropa yang menyatakan bahwa CSI telah meningkatkan biaya yang memungkinkan adanya *involuntary trade barrier* berupa biaya ekonomi tambahan dan keterlambatan pengiriman barang yang kemudian menurunkan efisiensi produksi negara (Mirza dan Verdier, 2011: 18).

CSI telah menciptakan *non tariff trade barrier* karena *tariff trade barrier* yang akan berakhir dalam era perdagangan bebas maka CSI akan menjadi *trade barrier* baru. Hanya negara yang memiliki kemampuan keuangan yang besar dan kapasitas negara yang kuat yang mampu *comply* dengan CSI dan dapat meningkatkan *gain utility*-nya. Sedangkan dalam penelitian Shakurova dan Velea (2011:1) yang menguji hubungan antara *trade flows* dengan *security measures* menyimpulkan bahwa CSI memang menyebabkan peningkatan biaya yang signifikan bagi

negara dengan *weak power* namun tidak signifikan bagi negara yang *strong power*.

Shie (2004: 1) dalam penelitiannya tentang respon negara terhadap CSI dan PSI di kawasan asia tenggara memberikan suatu kesimpulan bahwa kecuali Singapura, sebagian besar negara-negara di kawasan tersebut merasa tidak perlu merespon dengan dua alasan yaitu permasalahan kedaulatan dan tidak adanya *trade barrier* yang signifikan ke AS. Berbeda dengan Nigel Brew yang melakukan penelitian respon Australia terhadap CSI, dimana disebutkan beberapa temuannya bahwa persepsi Australia bahwa CSI tidak akan mampu mencegah terorisme dengan menggunakan sarana prasarana cargo ke AS, kedua Australia menolak CSI karena hanya menguntungkan AS saja (Brew, 2003, para. 1-10).

2.2. *Perspektif Realisme dan Neorealisme dalam Ekonomi Politik*

Fiala, A. (2002) menjelaskan bahwa tujuan dari *self preservation* dari segala hal yang teratribusi kepada negara, dari perspektif ini maka terorisme harus dianggap sebagai serangan terhadap *political power* yang ditunjukkan dengan menjadikan terorisme sebagai ancaman (*threat*) terhadap *life* dan disisi yang lain *a no-limits war against terrorism* dianggap sebagai usaha untuk mempertahankan *power* dan kehidupan (Fiala, 2002: 5).

Maka bagi realis, negara harus memandang *war on terrorism* sebagai bagian dari pertahanan diri dan *power*. Sehingga memberikan label teroris sebagai agen dari sebuah negara menjadi penting karena perang melawan terorisme harus didudukkan pada posisi antara negara dengan negara. Hal ini dijelaskan oleh Masci dan Jost sebagaimana dikutip Fiala, strategi yang hanya berkonsentrasi pada individu dan kelompok akan gagal sebab teroris sangat bergantung pada negara yang mendukungnya. Inilah yang menjelaskan mengapa Amerika Serikat menyerang Afghanistan karena sebagai respon terhadap serangan terorisme kelompok Al Qaeda yang didukung oleh Taliban (Fiala, 2002: 5).

Walau pada dasarnya neorealisme merupakan pengembangan dari pemikiran realisme, pandangan neorealisme cenderung melihat segala sesuatu dari kacamata struktur dan unit-unitnya. Jika bagi realis manusia adalah jahat, maka bisa jadi menurut neorealis yang jahat adalah sistem. Teori neorealisme (realisme struktural) berusaha untuk lebih ilmiah dan lebih positif. Neorealis tetap mempertahankan nilai realis bahwa hubungan internasional antarnegara yang merupakan hubungan antagonistik dan konfliktual yang disebabkan oleh struktur anarkis dalam sistem internasional.

Hal yang membedakan neorealisme dengan realisme dilihat dari aktor yang berperan di dalam sistem internasional. Jika pada realisme aktor yang menjadi kunci utama dalam sistem internasional adalah negara (*state*), maka pada neorealisme aktornya adalah sistem itu sendiri. Sehingga meskipun

negara merupakan aktor yang dominan, *non-state actors* memiliki peranan yang penting dalam sistem internasional.

Struktur internasional dalam konsep neorealisme adalah anarki internasional, negara sebagai unit, perbedaan kapabilitas negara serta adanya *super power* lebih dari satu dimana terdapat hubungan antar negara-negara tersebut. Sedangkan konsep kunci dari neo realisme adalah perimbangan kekuatan, pengulangan internasional, dan konflik internasional yang berupa perang dan perubahan sistem internasional.

Neorealis menekankan bahwa anarki dalam hubungan internasional bukan berasal dari *human nature*, yang seperti realis katakan bahwa manusia pada dasarnya jahat. Tetapi neorealis mengatakan struktural yang membuat tindakan manusia itu jahat dan anarki. Dalam neorealis anarki dan damai disebabkan oleh struktur yang ada. Jika struktur menunjukkan damai, maka negara berupaya untuk membuat suatu kebijakan baik berupa aliansi atau pun *balance of power* guna sebagai respon terhadap suatu struktur tersebut. Tetapi sebaliknya, jika struktur menunjukkan sebuah perdamaian, maka suatu negara juga akan mengubah kebijakannya.

AS tidak akan mengeluarkan kebijakan GWOt, jika struktur internasional tidak memaksanya, dengan terjadinya serangan terorisme terhadap gedung WTC. Hal ini menunjukkan bahwa struktur internasional tidak aman, dan tidak ada kekuatan di atas kedaulatan negara. Struktur inilah yang mendorong dan memaksa AS mengeluarkan kebijakan GWOt sebagai respon menghadapi struktur internasional tersebut.

2.3. *Foreign Policy Analysis*

Dalam perspektif Realis, tujuan nasional dalam kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh perilaku internasional, seperti keamanan, kapabilitas militer, aliansi negara, dan *balance of power* (Morgenthau dan Thompson, 1993: 57). Sementara itu Christopher Hill dan Margot Light menyatakan bahwa kebijakan luar negeri sama dengan bola bilyar, dimana kebijakan luar negeri berada pada posisi sebagai determinan utama (Hill, Christopher dan Light, 1986: 157). Kebijakan luar negeri dalam *Interdependency Theorists* lebih ditekankan pada ekonomi politik internasional, politik domestik dan fluktuasi kepentingan nasional dan strategi diplomasi. Dimana dinamika politik domestik merupakan masalah dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri (George, 1980:114). Definisi kebijakan luar negeri menurut Holsti, adalah gagasan atau tindakan yang dirancang oleh pembuat keputusan suatu Negara untuk menyelesaikan permasalahan maupun mempromosikan sejumlah perubahan, pada perilaku sebuah atau beberapa aktor negara lain maupun non negara; ataupun juga mengubah atau mempertahankan sebuah objek, kondisi atau praktik di lingkungan eksternal (Holsti, 1992:82).

Maka bila dijabarkan, substansi kebijakan luar negeri suatu Negara dipengaruhi oleh (1) faktor-

faktor konteks eksternal yang meliputi struktur sistem internasional; struktur ekonomi dunia; tujuan dan kebijakan Negara lain; masalah-masalah global dan regional yang ditimbulkan oleh aktivitas perorangan; serta hukum internasional dan opini dunia (Holsti, 1992: 271-302), (2) faktor-faktor politik domestik, yang meliputi berbagai kebutuhan atau kepentingan sosioekonomi dan keamanan; karakter geografis; atribut nasional; struktur pemerintahan; opini publik; birokrasi; serta pertimbangan etis, (3) pengaruh persepsi dan perilaku para aktor pembuat kebijakan meliputi, citra, perilaku, nilai, doktrin, ideologi, analogi dan bahkan kepribadian.

Rosenau (1969) mengemukakan bahwa situasi dan kondisi lingkungan (internal dan eksternal) saling berinteraksi dalam proses pembentukan kebijakan luar negeri sebuah negara, sehingga keterkaitan antara aspek nasional dan internasional (internal dan eksternal) digunakan sebagai variabel bebas. Sedangkan, kebijakan luar negeri suatu negara digunakan sebagai variabel terikat (Rosenau, 1987:1). Selanjutnya, Rosenau juga mengemukakan bahwa keterkaitan antara aspek internal dan eksternal memberikan input dalam kebijakan luar negeri suatu negara (Rosenau, 1969: 1-16).

Sejalan dengan pendekatan Rosenau dan Holsti diatas, Kim (1994) secara garis besar mengemukakan bahwa ada tiga pendekatan utama yang menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri. Pertama, pendekatan internal (*domestic/societal*), kedua, adalah pendekatan eksternal (*external/systemic*), dan yang ketiga, adalah keterkaitan antara faktor internal dan eksternal (*domestic and external linkages*) (Kim, 1994: 21).

Dalam pendekatan internal dikemukakan bahwa kebijakan luar negeri hanya ditentukan oleh faktor internal seperti, warisan sejarah, kepemimpinan, politik dalam negeri, kepentingan nasional, ideologi dan kemampuan. Sedangkan, pendekatan eksternal mengemukakan bahwa tingkah laku negara di dunia internasional, kedudukannya ditentukan dalam sistem internasional (Kim, 1994: 21).

2.4. *Economic Statecraft Concept*

David A. Baldwin dalam *Economic Statecraft* menjelaskan bahwa *statecraft* secara tradisional didefinisikan sebagai *the art of conducting state affairs*. Selain itu Baldwin juga mengutip beberapa definisi lain terkait dengan pendefinisian *statecraft*, seperti Harold dan Margaret Sprout yang senada dengan K.J. Holsti yang memandang bahwa *statecraft* sebagai aksi yang terencana dari negara untuk mengubah *external environment* baik kebijakan ataupun perilaku negara lain sehingga tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh *policy makers* (Baldwin, 1985: 8-9).

Selanjutnya Baldwin dalam mendefinisikan *economic statecraft* memberikan pemaparan mulai dari *semantic taste* hingga perdebatan akademis yang berkembang, sehingga ia membuat kesimpulan bahwa *semantic taste* tidak relevan untuk memahami definisi

economic statecraft, dan Baldwin menjelaskan bahwa *economic statecraft* didefinisikan sebagai (Baldwin, 1985: 39-40):

1. *Emphasizes means rather than ends*, lebih menekankan maksud dari pada hasil akhirnya, misalnya pemboman pabrik-pabrik tidak dapat didefinisikan sebagai *economic statecraft*.
2. *Economic statecraft does not restrict the range of goals that may be sought by economic means*, secara empiris fakta yang tidak terbantahkan bahwa para pengambil kebijakan sering menggunakan instrumen ekonomi untuk tujuan yang lebih luas dari tujuan ekonomi.
3. *Economic statecraft treats policy instruments as property concept, thus facilitating the maintenance of a clear distinction between undertakings and outcomes*, negara memperlakukan instrumen kebijakan sebagai *property concept* sehingga memudahkan untuk pemeliharaan perbedaan antara usaha dengan hasil.
4. *Economic statecraft* memasukkan definisi ekonomi, sehingga dapat membedakan antara teknik ekonomi dan yang bukan.

Selain itu Baldwin (1985) juga membedakan *economic statecraft* dalam dua bentuk yaitu *negative sanction* (contohnya: embargo) dan *positive sanction* (contohnya: *tariff discrimination*). Secara sederhana ia membedakan bahwa *positive sanction* didefinisikan sebagai sanksi yang memberikan atau menjanjikan kepada negara target dengan *reward*, sedang *negative sanction* didefinisikan sebagai sanksi yang akan memberikan atau mengancamnya dengan *punishment* (Baldwin, 1985: 41-42).

Untuk memberikan kerumitan pemahaman antara *reward* dengan *punishment* adalah menentukan *baseline* harapan negara target pada saat *sender* memberikan sanksi. Dalam *positive sanction*, target mengharapkan adanya posisi relatif di masa depan (*expected future value*) terhadap sesuatu yang bernilai bagi target, sedangkan *negative sanction* akan menciptakan *relative deprivation* atau menjanjikan kecenderungan untuk membayar *cost* yang signifikan ketika berhasil, dan akan mengancam *cost* lebih tinggi lagi jika gagal.

Selanjutnya untuk operasionalisasi konsep tersebut, Francesco Giumelli menjelaskan *dependent variable* dan *independent variable* dari *economic statecraft* yang digagas oleh Baldwin dengan membangun kerangka teoritis dari sanksi. Giumelli berpendapat bahwa tidak semua sanksi dibuat secara *equal*, sehingga dibutuhkan suatu *functional typology* yang memberikan pemahaman tentang perbedaan dari sanksi-sanksi itu. Dan pembuatan *typology* hanya mungkin dibuat jika setiap klasifikasi sanksi harus dipahami bahwa sanksi (hanya salah satu dari empat metode kebijakan luar negeri tersebut) tidak pernah dikenakan sendiri, yang berarti bahwa sanksi selalu dan hanya berkontribusi pada tujuan kebijakan luar negeri (Baldwin, 1971; Lawson, 1983; van Bergeijk, 1994; Nincic, 2008 sebagaimana dikutip oleh Giumelli, 2011: 29-30).

Lanjut Giumelli menegaskan bahwa sanksi adalah salah satu aksi yang dapat dipilih para pengambil keputusan kebijakan luar negeri terhadap lingkungan eksternalnya. Pilihan yang lainnya yang mungkin adalah penggunaan *violence*, penawaran *material gains* dan diplomasi Giumelli, 2011: 29-30). Giumelli dengan mengintegrasikan dan mengembangkan penelitian Baldwin, Art dan Haas, Baldwin menjelaskan tujuan *Economic Statecraft* adalah untuk menjelaskan bagaimana *state* menggunakan instrumen ekonomi untuk mencapai tujuan politiknya, Art menjelaskan *forces* sebagai alatnya dan Haas menjelaskan bagaimana konflik diartikulasikan. Sehingga Baldwin membuat instrumen kebijakan luar negeri menjadi 4 kategori yaitu propaganda, diplomasi, *economic statecraft*, dan *military statecraft* (Art, 1980; Haas, 1974; Baldwin, 1985 sebagaimana dikutip Giumelli, 2011: 29-30).

Sedangkan cara untuk mempengaruhi aktor lain dapat digunakan dengan cara persuasi yang damai, memberi insentif atau sanksi, dan serangan sehingga mau mengerjakan sesuatu. Sedang tujuan dari aksi, Art menjelaskan sebagai "*What a policy instrument used for*" atau "*in what ways the target(s) is(are) influenced*" sehingga Giumelli menjadikannya dua kategori yaitu *cooperative* atau *non cooperative*. *Exercise of power* tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan, Wolfer membaginya menjadi *survival*, *possession* dan *milieu goals* (Rummel dan Tantel, 1966; Haas, 1974; Wolfer: 1962, sebagaimana dikutip Giumelli, 2011: 29-30). Sedang target atau siapa yang hendak dipengaruhi, Baldwin (1985: 45) menjelaskan akan sangat bervariasi mulai individu, entitas, Negara dan organisasi internasional.

Bereskoetter dan Williams menjelaskan sanksi adalah *exercise of power* dalam kebijakan luar negeri, dan *power* dapat diartikan menjadi tiga dimensi, *winning the conflict*, *limiting alternatives and shaping normality*, yang kemudian Elman membagi sanksi dalam *non cooperative* (yang nantinya akan digunakan oleh penulis sebagai fokus penelitian) menjadi tiga kategori tujuan yaitu *coercion*, *constraint* dan *signal* (Bereskoetter dan Williams, 2007; Elman, 2005 sebagaimana dikutip Giumelli, 2011: 32-34).

Selanjutnya Giumelli (Giumelli, 2011: 32-34) menjelaskan bahwa diperlukan 2 asumsi dasar yang dipilih secara induktif, yaitu faktor *feasibility* dan *direct material impact*. Faktor *feasibility*, jika suatu sanksi layak (*feasible*) maka target tahu apa yang harus dilakukan dan dapat melakukannya karena permintaan tersebut tidak membahayakan keberadaannya. Di sisi lain, jika permintaan tersebut tidak dapat diterima oleh target, maka tujuan dari sanksi tidak akan mengubah perilaku target.

Kelayakan permintaan didasari oleh dua dimensi: ketepatan (*preciseness*) dan kepraktisan (*practicality*). Ketepatan merujuk pada apakah permintaan telah diartikulasikan cukup sehingga target tahu apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kehendak pengirim (*sender*), dan kepraktisan berarti bahwa permintaan tersebut dapat

dipenuhi oleh target tanpa mengorbankan keberadaannya. Permintaan disebut *precise* jika *sender* meminta target untuk melakukan satu atau lebih tindakan tertentu, kondisi *precise* tercapai jika target dapat mematuhi tanpa membahayakan keberadaannya.

Evaluasi kepraktisan sangat terkait dengan jenis target karena tidak semua aktor internasional berperilaku sesuai dengan prinsip yang sama. Kerangka kerja ini membedakan antara aktor rasional, ideologis dan kriminal. Kategori pertama meliputi aktor yang berpikir dan bertindak secara strategis untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka; kategori kedua aktor tersebut mempertimbangkan biaya dan manfaat, tetapi mereka telah membangun legitimasi mereka untuk bertentangan dengan *sender* dan menganggap lebih penting daripada biaya yang mereka pikul atas sanksi, sedangkan kategori ketiga melibatkan aktor yang pada dasarnya keberadaan mereka adalah melawan sanksi, setiap biaya yang dapat dikenakan kepada mereka tidak akan mengubah perilaku mereka, dan kepatuhan tidak akan menjadi pilihan (misalnya Al-Qaeda, Uni Nasional untuk Kemerdekaan Total Angola - UNITA). Variabel ini akan menjadi elemen penting untuk menganalisis kelayakan tuntutan. Ketepatan dan kepraktisan akan diukur dalam skala ordinal.

Faktor kedua adalah *direct material impact*, kurang signifikannya dampak yang ditimbulkan tidak berarti bahwa pengirim tidak memiliki kemauan politik untuk secara efektif memainkan peran dalam krisis. Faktor tersebut dibentuk oleh *cost of sanction* (biaya sanksi) dan *dependence* (ketergantungan) terhadap sumber daya yang ditolak oleh sanksi misalnya minyak pada Iran/Irak.

Adapun variable dasar *Economic Statecraft* adalah sebagai berikut:

1. *Threat to Sender*

Variabel *threat* mengacu pada tingkat ancaman yang diidentifikasi oleh pengirim. Dalam sistem internasional yang anarki, realist percaya bahwa aktor negara mengejar kelangsungan hidupnya sebagai tujuan yang paling penting. Dengan demikian, dari sudut pandang *Clausewitzian*, jika sanksi adalah kelanjutan dari politik dengan cara lain, maka semakin tinggi *threat against sender*, semakin tinggi komitmen *sender* untuk menghapus ancaman tersebut dengan memastikan bahwa target adalah tidak lagi berbahaya. Di sini, aktor yang relevan dari krisis adalah pengirim saja.

2. *Salience*

Salience adalah *degree of importance* yang melekat pada isu yang aktor buat. *Salience* dari sebuah isu dapat dikorelasikan dengan tingkat ancaman, tetapi mengacu pada pentingnya krisis untuk alasan yang tidak langsung terkait dengan kelangsungan hidup pengirim. Dengan kata lain, krisis yang menonjol mungkin tidak menimbulkan ancaman bagi pengirim, dan ancaman mungkin tidak menonjol karena *salience* tidak diukur dalam keamanan tradisional.

3. Complexity of Dispute

Complexity of Dispute merupakan variable yang digunakan untuk menggambarkan tingkat *intractability* krisis, dan variabel sistem yang memiliki kekuatan penjas dalam kebijakan luar negeri sebagai *interest* menjadi *incompatible*, karena itu, *sender* dan target masuk ke dalam *zero-sum game*, di mana keterlibatan dapat dipertimbangkan ketika peluang menang tinggi dan *interest* dipertaruhkan. Konsekuensinya sanksi dapat diterapkan untuk menghilangkan musuh, untuk menghindari intervensi dalam daerah yang bahaya atau untuk mengejar beberapa keuntungan.

2.5. Teori Kontra Terorisme

Ganor (2005) menyebutkan bahwa para penentu kebijakan kontra-terorisme untuk memahami rumusan apa sebenarnya tujuan utama untuk memerangi terorisme. Ganor kemudian menekankan bahwa tujuan utama kebijakan kontra-terorisme yaitu: *eliminating terrorism acts*, *minimizing damage caused by terrorism*, dan *preventing the escalation of terrorism* (Ganor, 2005: 44-46).

Mengeliminasi aksi terorisme dengan tindakan represif yang terukur dan proses peradilan yang terbuka. Namun, meminimalisasi dampak yang ditimbulkan aksi terorisme tak hanya menyangkut aspek keamanan dan hukum, melainkan juga aspek sosial-ekonomi. Terlebih lagi, mencegah perkembangan gejala terorisme harus dimulai dari penanaman nilai kebangsaan dan keagamaan yang terbuka, serta pendidikan kewarganegaraan.

Ada beberapa masalah yang unik dalam demokrasi untuk menciptakan sebuah kebijakan kontraterorisme yang efektif. Salah satu aspek paling penting dari sebuah kebijakan kontra terorisme yang efektif adalah pengumpulan informasi intelijen. Informasi ini akan menyediakan pembuat kebijakan dan pejabat militer mengambil tindakan yang tepat. Pengumpulan informasi intelijen telah dikenal sejak Perang Dingin dengan banyak pola pendekatan pengumpulan informasi.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendefinisian *Container Security Initiative (CSI)* sebagai *Economic Statecraft*

CSI harus bersesuaian dengan definisi *economic statecraft* sebelum menimbang kelayakannya. Definisi Balwin (1985) memberikan 4 (empat) pedomannya sehingga selanjutnya (1) CSI harus dipahami bahwa maksud kebijakan tersebut, bukan hanya tercapainya 100% peti kemas yang masuk AS telah diperiksa; (2) CSI tidak hanya merupakan instrumen kebijakan perdagangan untuk menciptakan non tariff *trade barrier* namun juga untuk tujuan yang lebih luas dari tujuan ekonomi tersebut; (3) CSI merupakan instrumen yang secara jangka panjang memiliki kapitalisasi politik bagi AS; (4) CSI secara jelas diketahui sebagai bagian teknik *trade barrier* walaupun dikemas dalam isu perang terhadap terorisme. Sehingga dengan melihat kesesuaian CSI

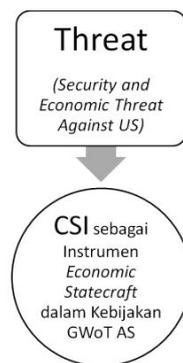
dengan definisi *economic statecraft* tersebut, maka dilakukan pengujian kelayakan CSI sebagai *economic statecraft*.

Kelayakan CSI sebagai *economic statecraft* harus memenuhi dimensi ketepatan (*preciseness*) dan kepraktisan (*practicality*), merujuk pada permintaan US CBP (2011, para. 10) terhadap target terkait CSI adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi peti kemas dengan risiko tinggi dengan menggunakan *targeting* yang terotomasi untuk mengidentifikasi *container* dengan memiliki potensi risiko terhadap terorisme berdasarkan informasi pendahuluan dan intelijen strategik.
2. Melakukan *prescreen* dan evaluasi peti kemas sebelum dipapalkan di pelabuhan keberangkatan (*port of origin*) dari negara target.
3. Menggunakan *x-ray* dan *gamma ray* yang memungkinkan semua kontainer telah dilakukan *screening*.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dijelaskan bahwa negara target dapat secara tepat mengimplementasikan apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kehendak pengirim (*sender*), dan permintaan tersebut sangat mungkin untuk dicapai target, walaupun *initial cost* tinggi pada saat pelaksanaannya, yang dalam jangka panjang akan memberikan keuntungan relatif (*relative gain*) bagi target. Sehingga CSI dapat dikategorikan layak (*feasible*) sebagai *economic statecraft* karena memenuhi dimensi ketepatan (*preciseness*) dan kepraktisan (*practicality*) bagi negara target.

3.2. Operasionalisasi Konsep



Gambar 3.1. Model Analisa Sederhana

Untuk operasionalisasi konsep, penulis hanya akan menggunakan *threat* sebagai variabel bebas dalam pemodelan, yang meliputi *security threat* and *economic threat*. Hal ini diambil dengan pertimbangan agar penelitian ini tetap fokus pada *threat* sebagai variabel penjas bagi variabel terikat yaitu *container security initiative*, sehingga didapat suatu penelitian yang mendalam dalam kajian terorisme dalam keamanan internasional. Selanjutnya *threat* akan dibagi menjadi 8 (delapan) *proxy* yang meliputi *security and economic threat*. Untuk mempermudah analisa dapat digambarkan model analisa sederhana sebagaimana dilihat pada gambar 3.1.

Variabel Terikat	Variabel Bebas	Kategori	Indikator	
CSI sebagai Instrumen Economic Statecraft dalam Kebijakan GwOT AS	THREAT (Security and Economic Threat Against US)	<i>Existence of Al-Qaeda Network</i> (Al Qaeda/QAE)	Ada Tidak Ada	Kanada, Belanda, Perancis dan China merupakan negara yang diketahui didalamnya ada jaringan Al Qaeda menjadi negara target CSI.
		<i>Incident of Political Violence</i> di Negara Target (Incident/INC)	Tinggi Rendah	Israel dan Pakistan merupakan negara dengan tingkat <i>political violence</i> tinggi dapat mengancam AS
		<i>Islam as Common Religion</i> di Negara Target (Religion/REL)	Mayoritas Muslim Mayoritas Bukan Muslim	Sebagian besar negara target yang mayoritas muslim tidak merespon secara optimal kebijakan GwOT
		Keanggotaan Negara Target dalam NATO atau Partner NATO (Friend/FRE)	Teman Bukan Teman	Negara yang bukan anggota NATO atau <i>Partner</i> NATO merespon pada tingkat yang rendah
		Rute terdekat dari <i>port</i> negara target ke N.Y /L.A. <i>port</i> AS (Distance/DIS)	Dekat Jauh	Secara tradisional semakin dekat suatu negara dalam kondisi anarki semakin mengancam keamanan
		Import AS dari Negara Target (Impor/IMP)	Pemasok Signifikan Pemasok Non Signifikan	Kanada, Jepang, China, dan Jerman adalah pemasok 45% impor AS, sehingga probabilitas ancaman terorisme dengan peti kemas lebih tinggi dibanding negara lain.
		Ekspor AS ke Negara Target (Ekspor/EXP)	Pasar Besar Pasar Kecil	<i>Economic Statecraft</i> membutuhkan kondisi asimetris dengan negara target, sehingga pasar besar memiliki posisi <i>bargaining</i> dengan kebijakan AS
		Neraca Perdagangan dengan Negara Target (Balance of Trade/ BOT)	Defisit Surplus	Kanada, Jepang, China, dan Jerman adalah penyumbang lebih dari 50% defisit perdagangan AS dapat mengancam stabilitas ekonomi AS.

Gambar 3.1. Operasionalisasi Konsep

3.3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Sumber data primer diperoleh dari terbitan US CBP-Department of Homeland Security (data terkait negara yang telah merespon CSI) dan National Consortium for Study of Terrorism and Response to Terrorism (START), A Center of Excellence of The U.S. Department of Homeland Security Based at the University of Maryland (data terkait *global terrorism database*), dan US Department of Commerce (data impor dan ekspor AS) dan sumber lainnya. Sumber data skunder diperoleh dari berbagai penelitian yang relevan dengan topik penelitian yang bersifat valid seperti penelitian *International Centre for Political Violence and Terrorism Research* pada *Institute of Defence and Strategic Studies*, Singapura.

Untuk tujuan pengolahan data peneliti membuat *dummy* untuk variabel terikat (CSI), dimana negara yang di analisa merupakan negara target dari kebijakan CSI tersebut dengan didapatkan memiliki

satu atau lebih pelabuhan (*port*) yang telah patuh terhadap CSI sebagai *included group* dengan kode 1 (satu), sedangkan negara yang tidak memiliki pelabuhan yang patuh CSI disebut *excluded group* dengan kode 0 (nol).

Sedangkan untuk variabel bebas untuk variabel *Existence of Al-Qaeda Network* (Al Qaeda/QAE), *Islam as Common Religion* di Negara Target, (Religion/REL), Keanggotaan Negara Target dalam NATO atau *Partner* NATO (Friend/FRE) juga digunakan *dummy*, dimana (1) pada variabel QAE jika di negara target terdapat jaringan *Al Qaeda* diberi kode 1 (satu) dan jika tidak ada diberi kode 0 (nol), (2) pada variabel REL jika di negara target mayoritas agama penduduknya adalah muslim diberi kode 1 (satu) dan jika tidak ada diberi kode 0 (nol), (3) pada variabel FRE jika negara target adalah anggota/partner NATO maka diberi kode 1 (satu) dan jika tidak ada diberi kode 0 (nol). Untuk kelima variabel bebas lainnya (INC,DIS,IMP,EXP,BOT) akan menggunakan data primer yang tersedia pada

badan atau intitusi yang berwenang atau berkompeten tentang bidang tersebut.

Selanjutnya analisa data merupakan langkah yang ditujukan untuk memperoleh informasi yang relevan, yang terkandung dalam data tersebut sehingga hasil pengolahannya dapat bermanfaat dalam pemecahan masalah. Data dalam penelitian ini merupakan data primer dari sumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai data yang valid dalam pengujian empiris.

Beberapa data dibuat variabel *dummy* untuk menyatakan satu kategori variabel *non metric* dengan k kategori dapat dinyatakan k-1 variabel *dummy*, *excluded* dan *included group*. Sehingga didapatkan informasi bahwa variabel terikat adalah *metric* sedangkan variabel bebas merupakan campuran *metric* dan *non metric*.

3.4. Pemilihan Teknik Statistik

Analisa terhadap hubungan *Container Security Initiative* (CSI) dengan *Threat* digunakan untuk membuktikan hipotesis yang dibuat. Dalam penelitian tersebut akan menggunakan pengujian secara statistik. Berdasarkan analisa jenis data yang didapatkan pada bahasan sebelumnya maka didapatkan petunjuk untuk pemilihan analisa yang tepat. Berdasarkan penjelasan Ghozali (2001) maka hubungan yang terbentuk merupakan model dependen yang dapat dianalisa dengan menggunakan *multivariate analysis*, selanjutnya variabel terikat hanya 1 (satu) variabel yaitu CSI yang bersifat *non metric* dan Variabel Bebas merupakan campuran dari data yang bersifat *metric* dan *non metric* sehingga analisa yang dapat digunakan adalah LOGIT and PROBIT Analysis (Ghozali, 2001,hal. 5-7).Berdasarkan pengujian asumsi *multivariate normal distribution* dengan *Kolmogorov-Smirnov Test* sebagaimana Tabel 3.2. didapatkan nilai probabilitas/Asymp. Sig (2-tailed) lebih kecil dari nilai alpha 5% kecuali variabel DIS, maka dapat disebutkan bahwa variabel tidak terdistribusi normal, sehingga model normal *cumulative distribution function* (CDF) yang biasa disebut PROBIT Model, kurang baik untuk digunakan.

Selanjutnya pilihan analisa akan dilakukan dengan LOGIT analysis. Memperhatikan jenis data variabel terikat yang berupa *dummy* dan ordinal maka

hal ini yang sering disebut dengan model logit kumulatif atau juga disebut *binary logistic regression* atau *ordinal logistic model* (Hosmer, dan Lemeshow, 1989: 1-10).

Maka model CUMULATIVE LOGIT atau BINARY LOGISTIC REGRESSION adalah sebagai berikut:

$$\text{Logit}(\text{CSI}_{ij}) = \beta_i X_j$$

atau

$$\text{Ln} \frac{\text{CSI}}{1 - \text{CSI}} = \beta_0 + \beta_1 \text{QAE} + \beta_2 \text{INC} + \beta_3 \text{REL} + \beta_4 \text{DIS} + \beta_5 \text{IMP} + \beta_6 \text{EXP} + \beta_7 \text{BOT}$$

atau

$$\text{CSI} = \frac{1}{1 + e^{\beta_0 + \beta_1 \text{QAE} + \beta_2 \text{INC} + \beta_3 \text{REL} + \beta_4 \text{DIS} + \beta_5 \text{IMP} + \beta_6 \text{EXP} + \beta_7 \text{BOT}}}$$

dimana: x`

$$\text{Ln} = \text{Log natural};$$

$$\frac{\text{CSI}}{1 - \text{CSI}} = \text{odds} = \frac{\text{Probabilitas (CSI | VariabelBebas)}}{1 - \text{Probabilitas (CSI | VariabelBebas)}}$$

Sehingga $\text{Ln} \frac{\text{CSI}}{1 - \text{CSI}}$ akan dibaca sebagai *log of odds*, yang merupakan fungsi linier dari variabel bebas dan dapat diinterpretasikan seperti koefisien pada analisis regresi sederhana.

CSI = *Container Security Initiative* sebagai Instrumen *Economic Statecraft* dalam Kebijakan GWoT AS;

QAE = *Existence of Al-Qaeda Network*;

INC = *Incident of Political Violence (bombing, armed/unarmed assault, assassination, infrastructure attack, kidnapping, hijacking)* di Negara Target;

REL = *Islam as Common Religion* di Negara Target;

DIS = Jarak Rute Pelayaran Komersial terdekat dari port negara target ke New York/Los Angles port AS;

IMP = *Import AS* dari Negara Target;

EXP = *Export AS* ke Negara Target;

BOT = *Balance of Trade* (Neraca Perdagangan) dengan Negara Target;

$\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7$ = Nilai koefisien dari setiap variabel bebas.

Tabel 3.2. *Kolmogorov-Smirnov Test*

		CSI	QAE	INC	REL	FRE	DIS	IMP	EXP	BOT
N		68	68	68	68	68	68	68	68	68
<i>Normal Parameters</i>	<i>Mean</i>	.50	.43	14.75	.15	.59	5.28	17.04	10.98	-6.3
	<i>Std. Deviation</i>	.50	.49	34.95	.36	.49	2.44	35.51	24.18	15.4
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.34	.37	.358	.51	.39	.13	.34	.33	.27
	<i>Positive</i>	.34	.37	.358	.51	.29	.13	.34	.29	.22
	<i>Negative</i>	-.34	-.30	-.33	-.34	-.39	-.07	-.33	-.33	-.27
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		2.80	3.11	2.95	4.23	3.18	1.10	2.77	2.74	2.25
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.00	.00	.00	.00	.00	.18	.00	.00	.00

a. *Test distribution* is Normal.

b. *Calculated from data.*

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Penelitian Analisa terhadap Statistika Deskriptif

Variabel Terikat (CSI) dan Variabel Bebas (QAE, REL, FRE) merupakan variabel *dummy* yang bersifat kategorial sehingga tidak memerlukan deskripsi statistik terkait nilai minimum, maksimal dan *mean*-nya. Sedangkan Variabel Bebas lainnya (INC, DIS, IMP, EXP, BOT) yang merupakan data metrik didapatkan informasi sebagaimana dalam Tabel 4.1., dimana variabel INC yang menggambarkan jumlah kejadian *political violence* di negara target dengan nilai maksimal 195 kejadian, negara tersebut adalah India, namun India tidak merespon CSI, Hal ini berlawanan dengan harapan yang diinginkan bahwa INC akan bersifat positif terhadap CSI,

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
CSI	68	0	1	.50	.504
QAE	68	0	1	.43	.498
INC	68	0	195	14.75	34.953
REL	68	0	1	.15	.357
FRE	68	0	1	.59	.496
DIS	68	1	11	5.28	2.436
IMP	68	1	217	17.04	35.514
EXP	68	1	164	10.98	24.181
BOT	68	-84	10	-6.30	15.385
Valid N (listwise)	68				

Berdasarkan nilai mean atau rata-rata dalam Tabel 4.1. dapat diperoleh informasi bahwa Variabel INC, dengan nilai mean 14,75 walaupun relatif kecil terhadap nilai maksimal namun jika melihat data yang digunakan adalah *cross sectional* sehingga dapat dipahami hampir terjadi 1 kejadian setiap bulan di setiap negara dalam populasi, ini juga mengancam keamanan. Namun perbedaan nilai yang tinggi menunjukkan bahwa kejadian *political violence* terkonsentrasi. DIS memiliki mean 5,28 *kilo nautical miles* atau hampir separuh dari nilai maksimal yang dapat diartikan negara target tersebar di Eropa dan Asia Timur. Sedangkan dalam Variabel IMP dan EXP memiliki jarak yang jauh dengan nilai maksimalnya memberikan informasi bahwa impor dan ekspor AS hanya terkonsentrasi di beberapa negara target. Sedangkan BOT menginformasikan bahwa secara umum negara dalam populasi berkontribusi pada defisit perdagangan AS sebesar \$ 6 Miliar.

4.2. Prediksi Model

Langkah pertama yang dilakukan adalah menilai *overall fit model* terhadap data, beberapa hasil pengujian statistik yang dapat digunakan untuk menerima atau menolak H_0 , dimana H_0 dalam tahapan

ini adalah model yang diprediksikan layak (*fit*) dengan data. Statistik yang digunakan berdasarkan pada fungsi *likelihood*. *Likelihood* dari model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. Untuk menguji H_0 *likelihood* ditransformasikan menjadi *-2log likelihood*, model hanya memasukkan konstanta saja yang dari tabel 4.2. diketahui nilainya 94.268% dan H_0 dapat diterima jika nilai *-2log likelihood* lebih besar dari Chi Square Tabel (λ^2), df_{n-1} dimana n adalah jumlah sampel = 68, df_{67} dengan $\alpha = 5\%$ nilainya 87.108%, sehingga dapat diterima sehingga model *fit* dengan data. Hasil dari *Hosmer and Lemeshow Test* pada tabel 4.3. juga menguatkan hasil pada *likelihood*, karena *Chi Square* Tabel (λ^2) pada *Hosmer and Lemeshow Test* signifikan pada 0.089 lebih besar dari 0.05 sehingga H_0 diterima.

Tabel 4.2 Likelihood Model

Iteration	Coefficients	
	-2 Log likelihood	Constant
Step 0	1	94,268

Tabel 4.3. Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	Df	Sig.
1	13,749	8	.089

Tabel 4.4. Uji Wald

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0 Constant	.000	.243	.000	1	1.00	1.000

Selanjutnya menguji variabilitas variabel bebas, yaitu melihat seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam memprediksi variabel terikat dalam model. Untuk menguji variabilitas dapat menggunakan uji wald, dengan hasil pada Tabel 4.4, dimana diketahui nilai *wald* =0.000 lebih kecil dari 0.05, dengan nilai signifikan pada 1.000 atau 100%, sehingga dapat diartikan Variabel Bebas dapat menjelaskan Variabel Terikat pada tingkat Signifikan 100% dijelaskan oleh faktor dalam model.

Untuk menilai ketepatan prediksi, dapat dengan melihat *class plot* pada gambar 4.1, pada sumbu x merupakan probabilitas prediksi dari 0 sampai 1 bahwa variabel terikat dikelompokkan sebagai AS memilih menggunakan CSI ke negara target "1". Sumbu y adalah frekuensi jumlah kasus yang dikelompokkan. Di dalam *plot* adalah kolom observasi dimana AS memilih menggunakan CSI ke negara target dengan kode "1" dan AS tidak memilih menggunakan CSI ke negara target dengan kode "0" keduanya dengan 0,25 kasus per symbol. Pengamatan terhadap *plot* menunjukkan model mampu mengelompokkan kasus yang sulit yaitu kasus yang mendekati $p = 0.5$. Selanjutnya menentukan koefisien dalam model, berdasarkan hasil pengolahan statistik SPSS dalam tabel 4.5.

menggunakan CSI kepada negara target akan naik sebesar 53% jika terdapat fakta bahwa negara target mayoritas muslim, namun demikian signifikansi variabel tersebut untuk menjelaskan mengapa AS memilih/tidak memilih menggunakan CSI sebagai instrumen GWoT hanya 43%, yang berarti ancaman ada dan tinggi namun variabel ini tidak menjadi bahan pertimbangan pemilihan kebijakan tersebut, sehingga variabel REL memiliki interpretasi yang relatif sama dengan variabel QAE.

Keempat, variabel bebas FRE memiliki koefisien 54% dan berkorelasi positif dengan variabel terikat, dapat diartikan bahwa *log of odds* AS memilih menggunakan CSI kepada negara target akan naik sebesar 54% jika negara target adalah anggota NATO atau negara partner NATO namun demikian signifikansi variabel tersebut untuk menjelaskan mengapa AS memilih/tidak memilih menggunakan CSI sebagai instrumen GWoT hanya 65%, yang berarti ancaman ada dan tinggi namun variabel ini tidak menjadi bahan pertimbangan pemilihan kebijakan tersebut.

Kelima, variabel bebas DIS memiliki koefisien 14% dan berkorelasi positif dengan variabel terikat, dapat diartikan bahwa *log of odds* AS memilih menggunakan CSI kepada negara target akan meningkat sebesar 14% jika terdapat penambahan jarak rute pelayaran perdagangan negara target dengan *L.A./N.Y. port* AS namun demikian signifikansi variabel tersebut untuk menjelaskan mengapa AS memilih/tidak memilih menggunakan CSI sebagai instrumen GWoT sebenarnya relatif tinggi yaitu hampir 70%, yang berarti ancaman ada dan tinggi namun variabel ini tidak menjadi bahan pertimbangan pemilihan kebijakan tersebut.

Keenam, variabel bebas IMP memiliki koefisien 91% dan berkorelasi positif dengan variabel terikat, dapat diartikan bahwa *log of odds* AS memilih menggunakan CSI kepada negara target akan meningkat sebesar 91% jika nilai impor AS dari negara target naik. Selanjutnya signifikansi variabel tersebut untuk menjelaskan mengapa AS memilih/tidak memilih menggunakan CSI sebagai instrumen GWoT sangat tinggi yaitu hampir 96%, yang berarti ancaman ada dan sangat tinggi dan variabel ini menjadi salah satu bahan pertimbangan penting pemilihan kebijakan tersebut.

Ketujuh, variabel bebas EXP memiliki koefisien 89% dan berkorelasi negatif dengan variabel terikat, dapat diartikan bahwa *log of odds* AS memilih menggunakan CSI kepada negara target akan menurun sebesar 89% jika nilai ekspor AS ke negara target naik. Selanjutnya signifikansi variabel tersebut untuk menjelaskan mengapa AS memilih/tidak memilih menggunakan CSI sebagai instrumen GWoT sangat tinggi yaitu hampir 96%, yang berarti ancaman ada dan sangat tinggi dan variabel ini menjadi salah satu bahan pertimbangan penting pemilihan kebijakan tersebut.

Kedelapan, variabel bebas BOT memiliki koefisien 88% dan berkorelasi positif dengan variabel

terikat, dapat diartikan bahwa *log of odds* AS memilih menggunakan CSI kepada negara target akan meningkat sebesar 88% jika nilai defisit pada BOT AS dengan negara target naik. Selanjutnya signifikansi variabel tersebut untuk menjelaskan mengapa AS memilih/tidak memilih menggunakan CSI sebagai instrumen GWoT sangat tinggi yaitu hampir 96%, yang berarti ancaman ada dan sangat tinggi dan variabel ini menjadi salah satu bahan pertimbangan penting pemilihan kebijakan tersebut sebagaimana variabel IMP dan EXP.

Berdasarkan interpretasi terhadap hubungan variabel bebas dengan variabel terikat dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa:

1. Variabel *Security Threat* yaitu variabel QAE, INC, REL, FRE, DIS tidak signifikan menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan CSI dipilih/tidak sebagai instrumen kebijakan. Selain itu juga adanya pola pergerakan yang berlawanan dengan persepsi ancaman AS kepada kelima variabel tersebut. Selanjutnya hal ini harus dianalisa lebih lanjut untuk memahami fenomena tersebut karena berlawanan dengan *mainframe*.
2. Variabel *Economic Threat* yaitu variabel IMP, EXP, BOT menjadi faktor yang sangat signifikan dalam pertimbangan AS membuat kebijakan CSI tersebut dipilih sebagai instrumen kebijakan GWoT. Walaupun demikian analisa mendalam tetap diperlukan untuk mendapatkan pendapat perbandingan pada penelitian atau literatur akademis serta teori yang relevan sehingga dapat memperkuat hipotesis yang diajukan.

Selanjutnya dapat dipahami bahwa secara statistik bahwa terdapat persepsi adanya *threat* yang tinggi baik itu *security threat* maupun *economic threat*. Dimana kedua jenis ancaman tersebut diyakini oleh para pengambil keputusan di AS sebagai ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup negaranya. Sehingga hal ini memperkuat pandangan *Clausewitzian*, jika CSI sebagai *economic statecraft* adalah kelanjutan dari tujuan politik AS dalam mempertahankan pengaruhnya dengan cara lain. Dan terdapat suatu kecenderungan yang semakin tinggi adanya *threat against US* baik itu isu keamanan maupun ekonomi, AS akan menggunakan semua *instrument* yang dimilikinya untuk menghapus ancaman tersebut dengan memastikan bahwa target adalah tidak lagi berbahaya.

4.4. Analisa Container Security Initiative (CSI) Sebagai Economic Statecraft

Dalam penelitian tersebut didapatkan fakta belum lagi kondisi *non-reciprocal* dalam pemberlakuan CSI oleh AS, sampai dengan berakhirnya penelitian ini AS hanya memperbolehkan Jepang dan Kanada. Padahal Cina yang memiliki variabel statistik yang sama dalam penelitian ini tidak memperolehnya, sehingga benar bahwa CSI adalah *positive sanction* namun, pada kasus Cina dapat diduga, terjadi *trade barrier* dari AS karena penyumbang defisit neraca perdagangan AS terbesar.

Bukti semakin menguatkan temuan dalam penelitian sebelumnya.

Kondisi defisit perdagangan AS menjadi perhatian pengambil keputusan di AS, karena perekonomian AS yang sedang mengalami resesi ekonomi sampai dengan November 2001, dimana defisit perdagangan memberikan kontribusi besar untuk memperburuk perekonomian. Sehingga penyesuaian yang paling mungkin adalah menaikkan ekspor AS dan atau menurunkan impornya. Menaikkan ekspor akan sangat menuntut kemampuan domestik AS yang sedang lesu akan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang relatif lama. Sedangkan menurunkan impor dengan menaikkan tarif bea masuk akan sulit, karena perjanjian pasar bebas yang mengikat AS. Sehingga dibutuhkan instrumen perdagangan *non tariff trade barrier* yang tidak menimbulkan resistensi mitra dagang AS ataupun WTO. Kebijakan *non tariff trade barrier* menjadi pilihan yang paling mungkin dilakukan. Beberapa karakter kebijakan *non tariff trade barrier* yang dibuat haruslah memiliki dampak terhadap penurunan impor dan hal-hal lain yang sensitif terhadap efisiensi dalam rantai pasokan perdagangan.

Menimbang pada kebijakan kontra terorisme yang efektif haruslah melakukan prediksi *feedback* yang tercipta dari kebijakan tersebut. Misalnya hambatan perdagangan non-tarif yang dipilih, karena akan memiliki *effect* balikan yang sangat mungkin justru menciptakan kondisi yang lebih memberikan peluang terorisme mendapatkan keuntungan yang secara tidak langsung justru membesarkan kelompok terorisme.

Secara operasional kebijakan yang akan AS ambil seharusnya juga bersifat *asymmetric* dan hal ini juga berlaku untuk Cina yang pada uraian sebelumnya menjadi perhatian serius karena Cina adalah penyumbang defisit terbesar bagi AS. Selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah keberadaan negara berkembang yang dalam teori perdagangan banyak negara berkembang memiliki banyak mendapatkan keuntungan melalui internasional perdagangan. Ditemukan bahwa sementara ada contoh di mana selisih impor dan ekspor atau surplus neraca perdagangan berhasil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Banyak organisasi internasional, seperti OECD, dan UNCTAD untuk mempromosikan ekspor dan perdagangan internasional sebagai sarana untuk mendorong pembangunan di negara berkembang. Keterbukaan terhadap perdagangan, dan ekspor memiliki efek positif yang signifikan pada negara-negara berkembang. Sementara negara berkembang harus belajar menurunkan hambatan perdagangan dan ekspor di dalam negeri, negara maju harus juga bekerja mempromosikan suasana global di mana tarif dan hambatan non-tarif perdagangan diminimalkan.

Sehingga kebijakan AS yang memiliki hambatan non-tarif perdagangan harus menemukan rasionalisasi yang kuat. Negara berkembang merupakan sebagian besar negara di dunia sangat

bergantung dari perdagangan eksportnya. Menurut penelitian Laite (2010) menunjukkan, lebih dari 80 persen serangan teroris yang dianalisis berasal dari kelompok atau individu dari negara berkembang.

Sementara hasil menunjukkan bahwa negara-negara maju sangat kecil kemungkinannya untuk menjadi tempat kelompok terorisme. Bahkan, bukti secara konsisten menunjukkan bahwa *subset* dari negara dalam negara berkembang paling mungkin untuk kelompok teroris relatif lebih berkembang. Hanya 19,5 persen kelompok teroris yang kurang berkembang di negara berkembang, sementara 67 persen kelompok teroris lebih berkembang negara-negara berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa ada jendela pembangunan di negara-negara yang dimana paling mungkin untuk jejaring terorisme.

Sejak arus perdagangan internasional terbatas di negara-negara maju, mengurangi hambatan perdagangan akan memiliki sedikit efek pada perkembangan negara berkembang secara keseluruhan. Akibatnya, mengurangi hambatan perdagangan akan membantu mendorong negara-negara tersebut ke dalam jajaran negara maju, membuat dukungan mereka terhadap terorisme kecil kemungkinannya.

Negara maju dan negara berkembang secara tidak proporsional kebijakan global sering kali membebani negara-negara yang tidak mampu mematuhi peraturan baru. Sehingga semakin membuat *global injustice* menguat, yang secara tidak langsung ikut memberikan pembenaran terhadap propaganda jejaring terorisme global.

Hambatan perdagangan lebih lanjut untuk negara berkembang, untuk dapat patuh pada kebijakan keamanan perdagangan global menunjukkan biaya untuk pelabuhan kecil akan membutuhkan 113 persen lebih tinggi dari pelabuhan besar, sedangkan beban operasional tahunan pelabuhan-pelabuhan kecil 58 persen lebih tinggi dari *port* besar. Skala ekonomi yang dinikmati oleh pelabuhan besar *vis-à-vis* pelabuhan-pelabuhan kecil hanya memperburuk perbedaan-perbedaan dalam biaya.

Hambatan perdagangan non-tarif yang dibuat oleh program-program keamanan perdagangan, dikombinasikan dengan fakta bahwa eksportir di negara berkembang sering membayar dua sampai tiga kali lebih banyak pada biaya impor daripada eksportir dinegara-negara maju, jelas bahwa perdagangan hambatan yang signifikan untuk negara berkembang. Disparitas ini memiliki implikasi signifikan bagi negara berkembang.

Biaya yang lebih tinggi dari pengiriman lebih sulit bagi negara-negara tersebut, sehingga membatasi pertumbuhan PDB dan pembangunan ekonomi. Demikian pula, semakin rendah biaya impor biaya ke negara-negara berkembang membuat lebih mudah bagi negara maju untuk membanjiri negara berkembang dengan produk mereka, yang membatasi pembangunan ekonomi dengan membuat mustahil

bagi industri kecil di negara berkembang untuk bersaing.

Mengingat adanya keterkaitan antara kecenderungan negara berkembang dengan terorisme, dengan menciptakan hambatan non-tarif perdagangan program keamanan perdagangan mungkin secara tidak sengaja mempromosikan lingkungan yang lebih menguntungkan bagi terorisme. Amerika Serikat dan kekuatan dunia lainnya harus mengatasi masalah ini, tidak hanya karena risiko keamanan terkait dengan tidak melakukannya, tetapi juga karena mereka memiliki tanggung jawab moral.

Untuk meminimalkan efek negatif dari keamanan perdagangan maritim, Amerika Serikat harus bekerja untuk mengurangi hambatan non-tarif perdagangan untuk mengimbangi program yang dibuat. Hal ini akan memberikan kewajiban AS untuk meningkatkan bantuan, terkait infrastruktur perdagangan dan biaya partisipasi kepatuhan terhadap program keamanan perdagangan maritim. AS dapat meminta US CBP dan US *Agency for International Development* (USAID), serta Departemen Perdagangan untuk mengembangkan kebijakan kepada negara berkembang untuk membantu mitra dagang AS yang paling terpengaruh/sensitif terhadap biaya keamanan.

Sehingga penelitian ini sejalan dengan laporan Uni Eropa yang menyatakan bahwa CSI telah meningkatkan biaya yang memungkinkan adanya *involuntary trade barrier* berupa biaya ekonomi tambahan dan keterlambatan pengiriman barang yang kemudian menurunkan efisiensi produksi negara. Dapat diduga CSI telah menciptakan *non tariff trade barrier* karena *tariff trade barrier* di era perdagangan bebas akan berakhir dan akan digantikan dengan *trade barrier* baru semacam CSI ini. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Shakurova dan Velea (2011) yang menguji hubungan antara *trade flows* dengan *security measures* menyimpulkan bahwa CSI memang menyebabkan peningkatan biaya yang signifikan bagi negara dengan *weak power* namun tidak signifikan bagi negara yang *strong power*.

Hanya negara yang memiliki kemampuan keuangan yang besar dan kapasitas negara yang kuat yang mampu *compliance* dengan CSI akan dapat meningkatkan *gain utility*-nya. Adapun negara-negara berkembang seperti Pakistan patuh terhadap CSI karena bantuan ekonomi dari AS yang luar biasa meningkat, sebagai partner utama AS dalam GWOt yang dikenal sebagai negara *front liner*. Karena AS beragapan Osama bin Laden menggunakan Afghanistan sebagai *safe house* sehingga kebutuhan AS untuk menjadikan Pakistan sebagai mitra. Namun ketika Osama ditangkap mati di Pakistan menimbulkan kemarahan AS kepada Pakistan, yang diketahui berdekatan dengan *camp* pelatihan militer Pakistan.

Temuan dalam penelitian ini berbeda dengan temuan Shie (2004) dalam penelitiannya tentang respon negara terhadap CSI dan PSI di kawasan asia tenggara memberikan suatu kesimpulan bahwa kecuali Singapura, sebagian besar negara-negara di

kawasan tersebut merasa tidak perlu merespon dengan dua alasan yaitu permasalahan kedaulatan dan tidak adanya *trade barrier* yang signifikan ke AS.: sama berbeda juga didapatkan dalam penelitian Nigel Brew (2003) yang melakukan penelitian respon Australia terhadap CSI, dimana disebutkan beberapa temuannya bahwa persepsi Australia terhadap CSI tidak akan mampu mencegah terorisme, sebagaimana pendapat Uni Eropa yang menyatakan 100% scanning tidak berarti memberikan garansi aman 100%, sedangkan temuan selanjutnya, senada dengan adanya *non tariff trade barrier*, dimana Australia menolak CSI karena hanya menguntungkan pihak AS saja. Peneliti berpendapat bahwa kondisi ini terjadi, walaupun Australia mitra dekat AS, namun kepentingan ekonomi Australia ke AS tidak besar, Hal ini dapat dilihat dari kecilnya nilai ekspor Australia ke AS.

CSI sebagai *non tariff trade barrier* dapat dibenarkan berdasarkan bukti sebaran CSI *port* yang tidak proposional, sebagaimana tergambar pada gambar 4.2., akan didapatkan analisa bagaimana AS hanya mendahulukan kepentingan negara-negara di utara dari pada di belahan selatan yang rata-rata negara dengan kondisi ekonomi berkembang.

Gambar 4.2. Sebaran CSI *Port* Antara Belahan Utara-Selatan



Sumber: diolah dari http://www.dhs.gov/files/programs/gc_1165872287564.shtm

Sehingga pemahaman CSI sebagai sanksi ekonomi (*negative sanction*) bagi negara berkembang dapat dipahami karena ketidakmungkinan untuk mendapatkan *relative gain* yang ditawarkan oleh CSI. *Baseline* yang awalnya diposisikan pada kondisi *positive sanction*, karena secara statistik perdagangan negara-negara yang patuh CSI tidak mengalami gangguan bahkan beberapa diantaranya seperti Belanda memetik buahnya.

Namun untuk negara-negara yang tidak dapat patuh karena ketidakmampuan kapasitas negaranya maka *baseline*-nya adalah membebankan biaya keamanan itu ke pelaku bisnisnya yang secara tidak langsung akan menurunkan daya saingnya di AS. Namun jika tidak maka harus mengalihkan pangsa pasar ekspornya dari AS ke negara lain. Tetapi kondisi ini juga dirasakan oleh Cina, sehingga satu-satunya rasionalisasi yang membuat mengapa Cina patuh terhadap CSI adalah ketergantungan ekonomi Cina terhadap Ekspor yang sangat tinggi, memindahkan pasar ekspor dari AS ke pasar lain hampir mustahil dilakukan oleh Cina karena begitu besarnya pasar AS.

Evaluasi kepraktisan CSI dapat dievaluasi dari mengevaluasi 34 negara yang merespon CSI, berdasarkan kerangka kerja yang dilakukan Giomelli (2011) yang membedakan setiap negara target antara aktor rasional, ideologis dan kriminal. Kategori pertama meliputi aktor yang berpikir dan bertindak secara strategis untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka, sehingga tidak ada statement resmi dari negara-negara target yang mengungkapkan: ini, sehingga sulit mengidentifikasi dari ke 34 negara target CSI yang masuk dari kategori tersebut.

Sebagian besar menurut peneliti masuk kategori kedua dimana aktor tersebut mempertimbangkan biaya dan manfaat, tetapi mereka telah membangun legitimasi mereka untuk bertentangan dengan *sender* dan menganggap lebih penting daripada biaya yang mereka pikul atas sanksi. Ini ditunjukkan oleh upaya banding pembatalan CSI oleh Uni Eropa dan negara lainnya, namun usaha ini terlihat tidak berhasil. Sehingga satu-satunya alasannya adalah pasar AS yang besar memaksa semua negara harus membuat pelabuhannya patuh CSI, jika tidak maka biaya yang dibebankan akan lebih tinggi lagi. Dari ke-34 negara target CSI, peneliti hanya mengidentifikasi Pakistan, yang masuk kategori ketiga melibatkan aktor yang pada dasarnya keberadaan mereka adalah melawan sanksi, setiap biaya yang dapat dikenakan kepada mereka tidak akan mengubah perilaku mereka, dan kepatuhan tidak akan menjadi pilihan.

4.5. Analisa Threat dalam Menjelaskan Pilihan AS terhadap CSI sebagai Kebijakan Luar Negeri AS

Pasca 9/11 nampak adanya tekanan keamanan terhadap kebijakan ekonomi luar negeri AS, hal ini didukung banyak penelitian yang menyatakan bahwa presiden memiliki keunggulan strategis dalam mengendalikan kebijakan luar negeri AS dalam agenda GWOt Presiden Bush. Presiden memiliki informasi yang lebih berkualitas sehingga memungkinkannya untuk memobilisasi tekanan terhadap suatu agenda kebijakan yang dipilihnya (Wrone, Howell dan Lewis, 2008 hal.1-16).

Selanjutnya terkait kebijakan ekonomi luar negeri, Krasner menjelaskan bahwa setiap keputusan ekonomi akan cenderung mempengaruhi secara diferensial, yang memiliki kecenderungan menciptakan konflik, maka untuk memahami mengapa suatu kebijakan diambil diperlukan pemahaman tentang motivasi dan persepsi pengambil keputusan (Krasner, 1978, hal. 70). Penelitian Milner dan Tingley (2011) menunjukkan bahwa faktor ekonomi politik dan ideologi secara sistematis mempengaruhi keputusan pengambil kebijakan dalam menentukan kebijakan *foreign aid* dan perdagangan.

Tekanan keamanan nasional AS yang luar biasa selama kebijakan GWOt setidaknya dalam jangka pendek telah mampu menyatukan kepentingan para pengambil keputusan domestik AS (Fleck dan Kilby, 2010, hal 185-197). Dengan demikian didapatkan

penjelasan dari variasi dalam kebijakan ekonomi luar negeri AS, yang menekankan kemampuan eksekutif untuk mengendalikan agenda kebijakan luar negeri, khususnya ketika masalah keamanan. Davis (2009, hal. 10) menjelaskan kepentingan keamanan mendorong negara untuk menawarkan *side payment* kepada sekutunya. AS akan menyelaraskan kebijakan ekonomi asing dengan kepentingan keamanan.

Pengalihan bantuan luar negeri AS dalam penelitian Moss, Rood dan Standly (2005, hal. 1) ditunjukkan bahwa agenda memerangi kemiskinan dalam GWOt, karena adanya keyakinan hubungan yang positif antara kemiskinan sebagai pemicu terorisme, memiliki keselarasan dengan negara target pada kebijakan GWOt, dimana secara geopolitik negara-negara tersebut berbatasan. Bukti lainnya adalah keputusan AS untuk menangguhkan pergeseran bantuan ekonomi dari Yordania karena dianggap sebagai sekutu yang mendukung tujuan strategis AS di kawasan timur tengah. Kebijakan ekonomi luar negeri AS telah dijadikan sebagai fungsi dari pergeseran prioritas keamanannya. Dalam konteks pasca 9/11, AS bergantung pada berbagai sekutunya untuk mendukung GWOt, dengan memanipulasi kebijakan ekonomi luar negerinya sebagai sarana untuk melibatkan mitra keamanannya di negara berkembang. Baldwin (1985, hal. 45) menyatakan bahwa dalam setiap upaya untuk mempengaruhi target, kebijakan luar negeri suatu negara akan mengejar lebih dari satu tujuan.

Kebijakan keamanan (*security initiative*) yang dikeluarkan AS keseluruhannya dilaksanakan setelah serangan terorisme 9/11, bertujuan untuk membuat perdagangan internasional lebih aman dari kegiatan terorisme sebagaimana diajukan dalam proposal AS ke WCO salah satu organisasi internasional dan kemudian disetujui. Ada 4 (empat) *security initiative* yang dikeluarkan AS yaitu *Container Security Initiative, Proliferation Security Initiative, Customs-Trade Partnership Against Terrorism, International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code*.

Bush Doctrine dalam arahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada periode 200–2009, memberikan pedoman agar semua pendekatan dilakukan dalam studi kasus CSI, terlihat AS menggeser pendekatan multilateral ke pendekatan unilateral. CSI seolah menjadi pintu penguatan pendekatan unilateralisme AS yang kemudian dilakukan AS, atas Afghanistan (2002) dan Irak (2003) yang masih dalam konteks kebijakan GWOt-nya. Meski pendekatan unilateralisme ditolak oleh sekutu-sekutu terdekatnya di Eropa, semacam Perancis dan Jerman, dan juga Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat mengabaikannya. Inggris, meskipun bergabung dengan Amerika Serikat dalam invasi ke Irak, namun kemudian mundur dengan alasan penerimaan domestik Inggris.

CSI sebagai kebijakan luar negeri AS dapat dijelaskan oleh Robert Jervis dalam *Understanding the Bush Doctrine* bahwa Amerika Serikat untuk sedang melakukan pengujian kekuatan hegemoninya dalam

politik internasional yaitu yang unipolaritas. CSI sebagai *economic statecraft* dianggap sukses jika asumsi ini terpenuhi. Berdasarkan tren CSI seolah AS menetapkan diri masih sebagai hegemon. Bahkan Cina pun patuh terhadap CSI, karena sebagai *economic statecraft* atau sanksi pada umumnya hanya dapat efektif jika bersifat *asymmetric*.

AS dengan CSI-nya, juga membenarkan teori Goldstein (1988) yang menyatakan jika hegemoni berarti kebiasaan untuk mendikte, mendominasi, mengatur, dan merancang konstelasi dan geopolitik internasional, maka AS dalam kasus CSI dapat dikatakan power-nya sebagai hegemoni masih dapat dirasakan. Peneliti berpendapat bahwa untuk melanggengkan hegemoni itu, AS tidak hanya sedang memperkuat militernya saja tetapi instrumen yang lain.

Mengikuti alur berpikir Robert Gilpin (2002) dalam teori yang menyebutkan dalam konteks sejarah keamanan internasional, penempatan aliansi Barat terhadap Uni Soviet, memainkan peran penting dalam promosi Amerika dalam perdagangan bebas. Meskipun *Bank of England* memainkan peran sentral dalam pengelolaan standar emas, namun sistem moneter abad kesembilan belas umumnya *denationalised*. Pasca Perang Dunia II sistem tersebut didasarkan pada dolar dan tunduk pada pengaruh Amerika. Maka dalam kasus CSI pun dapat dibuat suatu analogi baru, mungkin perdagangan tetap akan dikuasai oleh China, Jepang dan Jerman namun keamanan perdagangan ada dibawah AS, sehingga jika ingin mengamankan perdagangan mereka maka setiap negara harus mengeluarkan biaya keamanannya.

Selanjutnya CSI dalam perspektif *realism* maka arah tujuannya tepat karena tujuan nasional dalam kebijakan AS dipengaruhi oleh perilaku internasional, seperti ancaman terorisme global dan kekuatan ekonomi baru seperti Cina. Maka bila dijabarkan, substansi kebijakan CSI sebagai kebijakan luar negeri AS dipengaruhi faktor-faktor konteks eksternal yang meliputi: struktur sistem internasional; struktur ekonomi dunia; tujuan dan kebijakan Negara lain; hukum internasional dan opini dunia, dan faktor-faktor politik domestik, yang meliputi kondisi ekonomi AS yang sedang resesi tahun 2001 dan yang selanjutnya pengaruh persepsi dan perilaku para aktor pembuat kebijakan terhadap ancaman. Dalam pendekatan internal dikemukakan bahwa kebijakan luar negeri hanya ditentukan oleh faktor internal salah satunya kepentingan nasional, ini sangat nampak dari penggunaan CSI.

Jika merujuk pendapat Giumelli (2011) yang menyatakan bahwa sanksi adalah salah satu aksi yang dapat dipilih para pengambil keputusan kebijakan luar negeri terhadap lingkungan eksternalnya, maka peneliti berpendapat pembuatan CSI sebagai instrumen kebijakan luar negeri sangat cerdas karena AS dapat memperoleh *total gain* terbesar dari pelaksanaannya walaupun biaya awalnya sangat mahal.

Namun jika dipahami lebih lanjut apa sebenarnya tujuan dari CSI, kita dapat menggunakan penjelasan Art (1980) yang menjelaskan sebagai "*What a policy instrument used for*" atau "*in what ways the target(s) is(are) influenced*" sehingga Giumelli menjadikannya dua kategori yaitu *cooperative* atau *non cooperative*. Melihat pola operasionalisasi CSI yang sangat *coercive* walaupun masih lebih dekat dengan *constrain* maka kebutuhan *exercise of power* dari AS sangat nampak.

Selanjutnya jelas Bereskoetter dan Williams (2007) menjelaskan bahwa *exercise of power* dalam kebijakan luar negeri, dan *power* dapat diartikan menjadi tiga dimensi, *winning the conflict, limiting alternatives and shaping normality*, maka AS sedang memainkan untuk membatasi alternatif setiap aktor, patuh CSI atau tidak bisa masuk pasar AS.

Terdapat bukti adanya persepsi *threat* yang tinggi, baik itu *security threat* maupun *economic threat*, pada para pengambil keputusan kebijakan luar negeri AS. Dimana kedua jenis ancaman tersebut diyakini oleh para pengambil keputusan di AS sebagai ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup AS. Temuan ini memperkuat pandangan *Clausewitzian*, sehingga CSI sebagai *economic statecraft* dapat disebut sebagai kelanjutan dari tujuan politik AS untuk mempertahankan pengaruhnya (*exercise of power*). Semakin tinggi *threat against US*, baik itu isu keamanan maupun ekonomi, muncul maka para pengambil keputusan AS, akan semakin bersemangat dengan berbagai instrumen yang dimilikinya untuk menghapus ancaman tersebut dengan memastikan bahwa target adalah tidak lagi berbahaya.

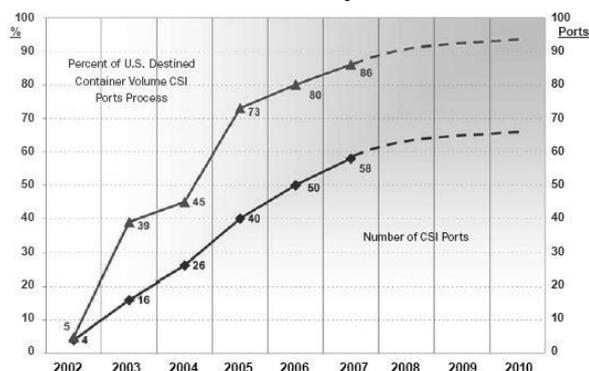
4.6. Analisa Threat dalam Menjelaskan Pilihan AS terhadap CSI sebagai Strategi Penanggulangan Terorisme dalam GwOT

CSI sebagai bagian kebijakan GwOT secara efektif meningkatkan keamanan bagi seluruh pelabuhan dan pesisir di AS dari serangan terorisme. Hal ini ditunjukkan adanya kenaikan yang signifikan terhadap pemeriksaan *container* dari yang sebelumnya hanya 2-5% per tahun meningkat hampir mencapai 100%. Jika ditinjau dari Strategi Kontra Terorisme, AS telah mampu menciptakan kondisi *deterrence* bagi kelompok terorisme dengan menutup pintu masuk ke AS bagi serangan terorisme. Ini membuktikan kebenaran saran Masci dan Jost (2001), bahwa strategi kontra terorisme akan efektif jika tidak hanya berkonsentrasi pada individu dan kelompok, namun aktor negara harus terlibat, karena kondisi anarki hanya bisa diselesaikan jika aktor negara secara bersamaan dalam konteks strategi yang sama dalam penanggulangan terorisme, baik itu dipaksa atau sukarela.

Dalam perspektif Fiala, A. (2002) menjelaskan bahwa tujuan dari *selfpreservation* dari segala yang teratribusi kepada negara, dari perspektif ini maka terorisme harus dianggap sebagai serangan terhadap *political power* yang ditunjukkan dengan menjadikan

terorisme sebagai ancaman (*threat*) terhadap *life* dan disisi yang lain *a no-limits war against terrorism* dianggap sebagai usaha untuk mempertahankan *power* dan kehidupan. Maka faktor penting dari mengapa CSI muncul harus dipahami dengan pendekatan *threat*. Maka pernyataan Bush sejalan dengan pengambilan keputusan CSI, walaupun ia dibuat atas pertimbangan ekonomi namun pengambil keputusan dapat mengemasnya sebagai agenda keamanan.

Gambar 4.3. Tren CSI *port* dan Presentase *Container* Diperiksa



Sumber: *Container Security Initiative: 2006–2011 Strategic Plan*, US CBP, 2006: 37.

Pada Gambar 4.3 menunjukkan peningkatan implementasi CSI dalam presentasi jumlah pelabuhan di tiap negara yang patuh dan *container* yang dapat diperiksa. Maka usaha semacam ini menunjukkan effort yang sangat luar biasa dari AS untuk negara harus memandang strategi kontra terorisme sebagai bagian dari pertahanan diri dan *power*.

Boaz Ganor (2005: 44-46) menyebutkan bahwa pengukuran efektifitas dari sebuah strategi kontra terorisme maka harus mampu menyambungkan hasil dengan tujuan dari kontra terorisme itu sendiri. CSI dalam: ini dapat dievaluasi dari, pertama, kemampuan CSI untuk mengeliminasi serangan terorisme, berdasarkan paparan dan data yang diuraikan dalam bahasan didapatkan bahwa CSI cukup memberikan batasan bagi jejaring terorisme untuk menjadikan pelabuhan AS sebagai sasaran. Ini terbukti pasca 9/11 belum ada insiden di pelabuhan AS.

Kedua, kemampuan CSI untuk meminimalkan kerusakan yang diakibatkan aksi terorisme, terlihat dengan memindahkan pemeriksaan *container* di pelabuhan keberangkatan atau bukan di AS. Ini menunjukkan CSI sangat cerdas memindahkan kemungkinan pemanfaatan *container* jauh sebelum sampai di tujuannya di pelabuhan AS dengan pendeteksian yang lebih awal. Karena terdeteksinya *container* yang dimanfaatkan oleh teroris di pelabuhan AS saja sudah dapat dianggap terlambat.

Ketiga, CSI dapat berfungsi mencegah terorisme tereskalasi, secara teknis CSI memang ditujukan sebagai langkah *preventive* dalam strategi kontra terorisme AS. Sehingga CSI sebagai bagian strategi

pengecahan terjadinya sasaran pada pelabuhan yang terbentang di seluruh pesisir AS dari serangan terorisme global, sebuah kerangka kerja yang menarik, walaupun biaya yang dikeluarkan sangat tinggi. Dan berdasarkan US CBP, walaupun mahal namun *net benefit*-nya masih menguntungkan.

5. KESIMPULAN

Terdapat bukti empiris bahwa CSI merupakan kebijakan ekonomi luar negeri AS untuk tujuan keamanan nasional AS yang secara menyakinkan bahwa CSI adalah *economic statecraft* dalam kebijakan GWOt AS. Hal ini diperoleh dalam pengolahan data secara statistik menunjukkan bahwa variabel *security threat*, tidak mampu secara signifikan memberikan penjelasan bagaimana proses pemilihan CSI sebagai instrumen kebijakan. Sedangkan variabel *economic threat* secara signifikan mampu menjelaskan bagaimana CSI dikonstruksi menjadi sebuah kebijakan dan dipilih sebagai instrumen kebijakan luar negeri AS.

CSI sebagai *non tariff trade barrier* dapat dibenarkan berdasarkan sebaran CSI *port* yang tidak proposional, walaupun dampak ekonomi seperti penurunan impor AS dan defisit neraca perdagangan tidak signifikan. Biaya yang mahal untuk implementasi CSI dampaknya sangat terasa bagi negara berkembang. Belum lagi kondisi *non-reciprocal* dalam pemberlakuan CSI oleh AS, sampai dengan berakhirnya penelitian ini AS hanya memperbolehkan Jepang dan Kanada. Padahal Cina yang memiliki variabel statistik yang sama dalam penelitian ini tidak memperolehnya, sehingga benar bahwa CSI adalah *positive sanction* namun, pada kasus Cina dapat diduga, terjadi *trade barrier* dari AS karena penyumbang defisit neraca perdagangan AS terbesar. Bukti semakin menguatkan temuan dalam penelitian sebelumnya.

Terdapat bukti adanya persepsi *threat* yang tinggi, baik itu *security threat* maupun *economic threat*, pada para pengambil keputusan kebijakan luar negeri AS. Dimana kedua jenis ancaman tersebut diyakini oleh para pengambil keputusan di AS sebagai ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup AS. Temuan ini memperkuat pandangan *Clausewitzian*, sehingga CSI sebagai *economic statecraft* dapat disebut sebagai kelanjutandari tujuan politik AS untuk mempertahankan pengaruhnya (*exercise of power*).

CSI sebagai bagian kebijakan GWOt secara efektif meningkatkan keamanan bagi seluruh pelabuhan dan pesisir di AS dari serangan terorisme. Hal ini ditunjukkan adanya kenaikan yang signifikan terhadap pemeriksaan *container* dari yang sebelumnya hanya 2-5% per tahun meningkat hampir mendekati 100%. Jika ditinjau dari strategi kontra terorisme, AS telah mampu mencapai posisi *deterrence* bagi kelompok terorisme dengan menutup pintu masuk ke AS bagi serangan terorisme. Ini membuktikan kebenaran saran Masci dan Jost (2001), bahwa strategi kontra terorisme akan efektif jika tidak

hanya berkonsentrasi pada individu dan kelompok, namun aktor negara harus terlibat, karena kondisi anarki hanya bisa diselesaikan jika aktor negara secara bersamaan dalam konteks strategi yang sama dalam penanggulangan terorisme, baik itu dipaksa atau sukarela.

Didapatkan suatu kondisi dimana AS secara menyakinkan masih didominasi pandangan *realist* dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri AS, dimana dalam penelitian ini nampak AS mengutamakan *national interest*-nyamengantikan arti penting ekonomi, sehingga ekonomi dianggap sebagai *a tool of politic*. Dan kondisi ini seolah menegaskan pendapat Kaufman (1969) bahwa kelompok-kelompok dalam dinamika domestik AS memiliki perbedaan tentang tujuan dari kebijakan luar negeri AS, namun mereka sepakat tentang pentingnya penggunaan *economic statecraft*.

6. SARAN

Walaupun penggunaan *Economic Statecraft Concept* dan *Foreign Policy Analysis* serta Teori Kontraterorisme mampu menjelaskan perilaku aktor dalam penelitian ini namun perlu ada penelitian lanjutan yang memungkinkan adanya keterkaitan antar instrumen dalam kebijakan GWOt sehingga didapatkan konstruksi utuh bagaimana suatu *grand strategy* kebijakan luar negeri AS baru, yang secara langsung sebagai pemilik *power* terbesar saat ini, akan memiliki dampak besar pada tatanan dunia, yang menurut pendapat peneliti sedang mencari keseimbangan baru baik secara politik dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Allison, G.(2004). *Nuclear Terrorism: The Ultimate Preventable Catastrophe* (pp. 107). New York: Times Books.
- Annual Report* (2005).Maritime Intelligence Group analyst. Washington, D.C.
- Baldwin, D. A. (1985). *Economic Statecraft* (pp. 8-9,39-40,41-42).New Jersey:Princeton University.
- Brew,N.(2003). *Ripples from 9/11: the US Container Security Initiative and its Implications for Australia*. Advice for the Parliament diakses di www.aph.gov.au/library/pubs/CIB/2002-2003/03cib27.pdf.
- Bush, G.W.(2001, September 20).*Address to a Joint Session of Congress* (pp.2.).Volume 107, Issue 1 of House document. University of Minnesota.
- Byman, D. (2006). *Allies in the War on Terrorism* (pp. 767-811). *Journal of Strategic Studies*.
- Caldwell, S.L. (2009). *Maritime Security: National Strategy and Supporting Plans Were Generally Well-Developed and are Being Implemented* (pp.1-5). DIANE Publishing.
- Container Security Initiative: 2006–2011 Strategic Plan*. (pp ii).(2006). U.S. Customs and Border Protection Office of Policy and Planning and Office of International Affairs Container Security Division. <http://epic.org/privacy/surveillance/spotlight/1006/csiplan.pdf> diakses tanggal 30 Maret 2012
- Dallimore (2008). *Securing the Supply Chain: Does the Container Security Initiative Comply with WTO Law?*(pp.34-41). Deutschland: Universität Münster.
- Davis, C.L. (2009). *Linkage Diplomacy: Economic and Security Bargaining in the Anglo-Japanese Alliance, 1902-23*. (pp.143-179). *International Security* 33(3).
- DHS (2009, June 18). *Container Security Initiative Port*. http://www.dhs.gov/files/programs/gc_1165872287564.shtm diakses pada tanggal 30 Maret 2012
- Elman, Collin.(2008).*Security Studies:An Introduction. Realism* (pp. 507). In Williams, Paul (Ed.).New York: Routledge.
- Epstein dan Kronstadt.(2011). *Commision Research Services*. Washington.
- Fiala, Andrew. (2002). *Terrorism and the Philosophy of History: Liberalism, Realism, and the Supreme Emergency Exemption. Essays in Philosophy*. Vol. 3.
- Fleck, R.K. & Kilby,C. (2010). *Changing Aid Regimes? U.S. Foreign Aid from the Cold War to the War on Terror* (pp. 185-197). *Journal of Development Economics*, 91
- Frittelli, John F.(2004, December 30). *Port and Maritime Security: Background and Issues for Congress*. Washington, D.C.: Congressional Research Service, RL31733.
- Ganor, B. (2005).*The Counter-Terrorism Puzzle: A Guide For Decision Makers*(pp.44-46). Hertselyah: Transaction Publishers.
- Gilpin, R. (1981). *War and Change in International Politics* (Ch. 1- 5). London: Cambridge University Press.
- Gilpin, R.(2002). *The Rise of American Hegemony," in Two Hegemonies: Britain 1846-1914 and the United States 1941-2001* (pp. 165-182). Patrick Karl O'Brien and Armand Clesse (Ed.), Aldershot: Ashgate Publishing, Ltd., 2002.
- Ghozali, I. (2009). *Analisa Multivariate Lanjutan dengan SPSS* (hal.5-7). Semarang: Badan Penerbit Univeritas Diponegoro.
- Ghozali, I.(2001). *Analisa Multivariate dengan SPSS* (hal.5-7). Semarang: Badan Penerbit Univeritas Diponegoro.
- Giumelli, F. (2011). *Coercing, Constraining and Signalling* (pp. 29-30). ECPR Press.
- George, A.L. (1980). *Presidential Decisionmaking in Foreign Policy* (pp.114). Colorado: Westview Press.
- Gordon, Peter, James E. Moore, III, Harry W. Richardson, and Qisheng Pan (2005). *The Economic Impact of a Terrorist Attack on the Twin Ports of Los Angeles-Long Beach*. Dalam Harry Ward Richardson and Peter Gordon (Ed.). *The EconomicImpacts of Terrorist Attacks*(pp.262-286). UK: Edward Elgar.
- Gómez, J.M.C.. (2010).*A Financial Profile of the Terrorism of Al-Qaeda and its Affiliates*. *Perspective on Terrorism*. Vol 4, No 4.

- Hill, C. & Light, M. (1986). International Relations: A Handbook of Current Theory. In Light, Margot dan Groom, A. J. R. (ed.), *Foreign Policy Analysis* (pp.157). London: St. Martins Pr.
- Holsti, K.J.(1992). *International Politics : A Framework for Analysis* (6th ed.). (pp. 82,269). New Jersey: Prentice: Internasional.
- Hosmer, D.W. & Lemeshow, S.(1989). *Applied Logistic Regression* (pp.1-10). Kanada: John Wiley and Sons Inc.
- Hufbauer, G.C., Schott, J.J., dan Elliot (2007). *Economic Sanction Reconsidered* (pp.125-148).(3rded.). Washington: Peterson Institute for International Economics.
- Iseby, J.(2008). *9/11 Commission* (pp.10-12). Nova Publishers.
- Kim, S. (Ed.) (1994). *Cina and the World : Chinese Foreign Relations in the post-Cold War Era*. pp.21. Colorado: Westview Press.
- Krasner, S.(1978). *Defending the National Interest: Raw Materials Investments and U.S. Foreign Policy*. (pp. 70). Princeton University Press.
- Mirza, D. & Verdier, T.(2007). *Are Lives a Substitute for Livelihoods? Terrorism, Security, and U.S. Bilateral Imports*. CEPR Discussion Paper No. DP61773. World Bank: 2011. pp. 1-2.
- Morgenthau, H. J.& Thompson, K.W. (1993). *Politics Among Nations* (6th ed.). New York : McGraw-Hill.
- National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States (2004). *Monograph on Terrorist Financing*. Washington, DC.: Staff Report to the Commission. (pp.13,19,67). http://govinfo.library.unt.edu/911/staff_statements
- Passas, N. & Gimenez-Salinas, A. F. (2007). *The Financing of Al Qaida's Terrorism: Myths and Realities* (pp.511). *Review of Penal and Criminal Law*, 2nd Semester, no.19.
- Randall L. & Schweller. (Summer, 1994). *Bandwagoning for Profit* (pp.74). *International Security*, Vol 19, No 1. The MIT Press.
- Reams, B.D.(1985). *Congress and the courts: a legislative history, 1978-1984 : documents and materials regarding the creation, structure, and organization of federal courts and the federal judiciary*. (section (A), par 2). Volume 1. W.S. Hein.
- Rosenau, J.N. (1987). New Directions in the Study of Foreign policy. In Hermann, C.F., Kegley, C.W., Rosenau, Jr. J.N. (Ed.). *Introduction : New Directions and Recurrent Questions in the Comparative Study of Foreign Policy*(pp.1). Boston : Allen & Unwia.
- Rosenau, J.N. (1969). *Lingkage Politics : Essays on the Convergence of National an International Systems* (pp. 1-16). New York : The Free Press.
- Shie, T. R. (July 2004). *The Nexus Between Counterterrorism, Counterproliferation, and Maritime Security in Southeast Asia*. Issues & Insights Vol. 4 - No. 4 Pacific Forum CSIS Honolulu, Hawaii
- Singh, R.(2006). The Bush Doctrine and the War on Terrorism: Global Responses, Global Consequences. In Mary E. A. Buckley & Robert Singh (Ed.), *The Bush Doctrine* (pp. 11). New York: Taylor & Francis.
- Swarson.(2003). *America Unbound: the Bush Revolution in Foreign Policy*. In I.H. Daalder & J.M. Lindsay (Ed.).(pp.120). Washington: Brookings Institution Press.
- United Nations (2004). *First Report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team appointed pursuant to resolution 1526 (2004) concerning Al-Qaida and the Taliban and associated individuals and entities*. New York: United Nations. pp.12. <http://www.un.org/sc/committees/1267/monitoringteam.shtml>
- United Kingdom Home Office (2006). *Report of the Official Account of the Bombings in London on 7th July 2005*. London. <http://www.homeoffice.gov.uk/documents/7-july-report?version=1>
- United Nations (2009). *Tenth Report of the Analytical Support and Sanctions Implementation Monitoring Team submitted pursuant to Resolution 1822 (2008) Concerning Al-Qaida and the Taliban and associated individuals and entities* ,(p.22). New York: United Nations, note 47.
- US CBP (2011, July 10). *CSI in Brief*. http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/cargo_security/csi/csi_in_brief.xml diakses pada tanggal 6 Juni 2012.
- Walt, S.M. (Spring. 1985). *Alliance Formation and the Balance of World Power* (pp.4). *International Security* Vol 9 No. 4. MIT Press.
- Waltz, K. N. (1997). *Evaluating Theories* (pp. 915–916). *American Political Science Review*. Vol. 91, No. 4.
- Walters, K.L. (2006). *Industry on Alert: Legal and Economic Ramifications of the Homeland Security Act on Maritime Commerce* (p. 329). *Tulane Maritime Law Journal*, 30.
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics* (pp.126). Berkeley: Addison-Wesley Publishing Company.
- Wein, L.M. (2003). *Preventing the Importation of Illicit Nuclear Materials in Shipping Containers* (pp. 24). Stanford University.
- Wrone, C., Howell, W. & Lewis, D.E.(2008). *Toward a Broader Understanding of Presidential Power: A Reevaluation of the Two Presidencies Thesis*. (pp.1-16) *Journal of Politics* 70(1).

LAMPIRAN

SUMBER DATA

VARIABEL	DATASET	DIMENSI	TAHUN	SUMBER DATA
VARIABEL TERIKAT				
CSI	<i>Port</i>	Negara Target yang merespon CSI	2002-2011	<i>DHS (Mei 2011). Container Security Initiative Port.</i> http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/cargo_security/csi
VARIABEL BEBAS: SECURITY THREAT				
QAE		Keberadaan Jaringan Al Qaeda per negara	2001	Gunaratna, Rohan (2005). <i>Inside Al Qaeda: Global Network of Terror</i> . Victoria: Griffin Press.
INC	<i>Global Terrorism Database</i>	Jumlah Kejadian <i>Bombing, Armed/un-armed Assault, Assassination, Infrastructu-re Attack, kidnapping, Hijacking</i> per Negara	2001	National Consortium for Study of Terrorism and Response to Terorism (START), A Center of Excellence of The U.S. Department of Homeland Security Based at the University of Maryland. Diakses pada tanggal 8 Juni 2012. http://www.start.umd.edu/datarivers/vis/GtdExplorer.swf
REL	<i>Religion Statistics</i>	Negara Target yang Mayoritas Penduduknya Muslim	2001	http://www.nationmaster.com/graph/rel_rel_all-religion-religions-all This website was created by Rapid Intelligence, a web technology company based in Sydney, Australia.
FRE	<i>List of Member/Partnership</i>	Negara target Anggota/ Partner NATO	2001	http://www.nato.int/cps/en/natolive/nato_countries.htm dan http://www.nato.int/cps/en/SID-7E4E1495-65485619/natolive/51288.htm
DIS	<i>International Nautical Mile represent Shortest Navigable Routes (2001)</i>	Jarak Port LA dan NY dengan Port Negara Target	n/a	U.S. National Imagery and Mapping Agency(2001). <i>Distances Between Ports</i> . Maryland: U.S. Government Printing Office.
VARIABEL BEBAS: ECONOMIC THREAT				
IMP		Import AS dari Negara Target	2001	
EXP	<i>US Trade for All Countries Dataset</i>	Ekspor AS ke Negara AS	2001	U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, Foreign Trade Division. http://www.census.gov/foreign-trade/balance/country.xls
BOT		Surplus (Defisit) Neraca Perdagangan AS	2001	

DATA TERKAIT PENELITIAN

NO	COD	COUNTRY	CSI	QAE	INC	REL	FRE	DIS	IMP	EXP	BOT
1	1220	Canada	1	1	0	0	0	2	217	164	-53
2	2010	Mexico	0	1	4	0	1	1	132	102	-31
3	2050	Guatemala	0	0	0	0	1	3	3	2	-1
4	2110	El Salvador	0	0	0	0	1	3	2	2	-1
5	2150	Honduras	1	0	0	0	1	2	4	3	-1
6	2230	Costa Rica	0	0	0	0	1	3	3	3	-1
7	2250	Panama	1	0	0	0	1	3	1	2	2
8	2360	Bahamas	1	0	0	0	1	1	1	2	1
9	2410	Jamaica	1	0	0	0	1	2	1	2	1
10	2470	Dominican Republic	1	0	0	0	1	2	5	5	1
11	2740	Trinidad and Tobago	0	0	0	0	1	2	3	2	-2
12	3010	Colombia	1	0	124	0	1	2	6	4	-3
13	3070	Venezuela	0	0	5	0	1	2	16	6	-10
14	3310	Ecuador	0	0	0	0	1	3	3	2	-1
15	3330	Peru	0	0	2	0	1	4	2	2	-1
16	3370	Chile	0	0	2	0	1	5	4	4	-1
17	3510	Brazil	1	0	1	0	1	5	15	16	2
18	3570	Argentina	1	0	0	0	1	6	4	4	1
19	4010	Sweden	1	0	0	0	0	4	9	4	-6
20	4039	Norway	0	0	0	0	0	4	6	2	-4
21	4050	Finland	0	0	0	0	1	5	4	2	-2
22	4099	Denmark	0	0	0	0	0	4	4	2	-2
23	4120	United Kingdom	1	1	11	0	0	4	42	41	-1
24	4190	Ireland	0	0	1	0	1	3	19	8	-12
25	4210	Netherlands	1	1	0	0	0	4	10	20	10
26	4231	Belgium	1	1	0	0	0	4	11	14	4
27	4279	France	1	1	9	0	1	4	31	20	-11
28	4280	Germany	1	1	4	0	0	4	60	30	-30
29	4330	Austria	0	0	0	0	0	5	4	3	-2
30	4351	Czech Republic	0	1	1	0	0	4	2	1	-1
31	4370	Hungary	0	0	0	0	0	5	3	1	-3
32	4419	Switzerland	0	0	2	0	0	4	10	10	1
33	4621	Russia	0	0	118	0	1	5	7	3	-4
34	4700	Spain	1	1	69	0	0	4	6	6	1
35	4710	Portugal	1	0	0	0	0	3	2	2	-1
36	4759	Italy	1	1	9	0	0	5	24	10	-14
37	4840	Greece	1	0	10	0	0	5	1	2	1
38	4890	Turkey	0	1	13	1	0	5	4	4	1
39	5050	Iraq	0	1	0	1	0	9	6	1	-6
40	5081	Israel	1	0	58	0	0	6	12	8	-5
41	5130	Kuwait	0	1	1	1	0	9	2	1	-2
42	5170	Saudi Arabia	0	1	1	1	1	6	14	6	-8
43	5200	United Arab Emirates	1	1	0	1	0	9	2	3	2
44	5230	Oman	1	0	0	1	1	10	1	1	-1
45	5330	India	0	1	195	0	1	10	10	4	-6
46	5350	Pakistan	1	1	30	1	0	11	3	1	-2
47	5380	Bangladesh	0	1	11	1	1	10	3	1	-3

NO	COD	COUNTRY	CSI	QAE	INC	REL	FRE	DIS	IMP	EXP	BOT
48	5420	Sri Lanka	1	0	32	0	1	10	2	1	-2
49	5490	Thailand	1	1	10	0	1	8	15	6	-9
50	5570	Malaysia	1	1	1	0	1	8	23	10	-13
51	5590	Singapore	1	1	0	0	1	8	15	18	3
52	5600	Indonesia	0	1	85	1	1	8	11	3	-8
53	5650	Philippines	0	1	43	0	1	7	12	8	-4
54	5660	Macau	0	0	0	0	1	7	2	1	-2
55	5700	China	1	1	13	0	1	6	103	20	-84
56	5800	Korea, South	1	0	0	0	0	6	36	23	-14
57	5820	Hong Kong	1	0	0	0	1	7	10	15	5
58	5830	Taiwan	1	0	2	0	1	7	34	19	-16
59	5880	Japan	1	0	2	0	0	6	127	58	-70
60	6021	Australia	0	1	2	0	0	8	7	11	5
61	6141	New Zealand	0	1	1	0	0	6	3	3	-1
62	7210	Algeria	0	1	89	1	0	4	3	2	-2
63	7290	Egypt	1	1	0	1	0	5	1	4	3
64	7530	Nigeria	0	0	3	0	1	5	9	1	-8
65	7550	Gabon	0	0	0	0	1	6	2	1	-2
66	7620	Angola	0	0	35	0	1	6	4	1	-3
67	7910	South Africa	1	1	0	0	1	7	5	3	-2
VARIABEL			KETERANGAN								
CSI			Dummy (1=Target, 0=Not Target)								
QAE			Dummy (1=Exist, 0=Not Exist)								
INC			Scale								
REL			Dummy (1=Moslem Majority, 0=Not)								
FRE			Dummy (1=NATO Member/Partner, 0=Not)								
DIS			Dalam Kilo Nautical Mile								
IMP			Dalam Milyar US \$								
EXP											
BOT											

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page intentionally left blank